





LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT DAYA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI











DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

No.	Proses Nama		Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Masnah, S.Pd.I	PIC Kegiatan SAKIP	13-10-25	Sh.
2.	Diperiksa	Radiţya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T	Kepala Subbagian Tata Usaha	13 - 10 - 25	Ø
3.	Disetujui	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T	Kepala Subbagian Tata Usaha	13 - 10 - 25	8
4.	Disetujui	Andreas, S.E, M.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	14 · 10 · 25	A
5.	Disetujui	Herwanto, A.Md.LLAJ., S.IP., M.M.	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	15-10-25	A
6.	Disetujui	M. Wahyu Arya Putra, SE., MMTR	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	14-10-25	B







PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Inayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan sarana pemantauan capaian kinerja dan anggaran berdasarkan dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan Timeline SAKIP Tahun 2025 Laporan Monitoring Capaian Kinerja terdiri dari 4 laporan yaitu Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Dimana setiap laporan akan menjelaskan capaian kinerja dan anggaran setiap periode triwulan berdasarkan Perjanjian Kinerja.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

> BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAR KELAS II PAPUA BARA

Sorong, 15 Oktober 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

ENDERAL PERHIE DY Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002







RINGKASAN EKSEKUTIF







RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dalam rangka mendukung visi Presiden RI pada Tahun 2025 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Indikator dan 23 (dua puluh tiga) indikator Kinerja Program dengan targetnya.

Dari 23 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang lebih besar atau sama dengan 100% (0%≤IKK<100%) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kurang dari 100% (0%≤IK<100%). Adapun rincian untuk setiap IKK pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebanyak 23 Trayek (target 23 Trayek) tercapai 100%;
- 2. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebanyak 0 unit (target 1 Unit) tercapai 0%;
- 3. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebanyak 5 Trayek (target 5 Trayek) tercapai 100%;
- 4. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM terealisasi sebanyak 0 unit (target 2 Unit) tercapai 0%;
- 5. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM terealisasi sebanyak 7 Lokasi (target 7 Lokasi) tercapai 100%;
- 6. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 50%;
- 7. Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 5 kegiatan) tercapai 40%;
- 8. Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 4 kegiatan) tercapai 50%;
- 9. Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
- 10. Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 0%;

- 11. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis terealisasi sebanyak 3.593 Unit (target 3.623 unit) tercapai 99%;
- 12. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 Orang (target 400 Orang) tercapai 0%;
- 13. Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 Orang (target 100 Orang) tercapai 0%;
- 14. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 67%;
- 15. Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 1 dokumen (target 1 dokumen) tercapai 100%;
- 16. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 100%;
- 17. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
- 18. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebanyak 1 dokumen (target 1 dokumen) tercapai 100%;
- 19. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 3 dokumen (target 6 dokumen) tercapai 50%;
- Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 100%;
- 21. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
- 22. Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 67%;
- 23. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 0%;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran program dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

IKI DA	HTIS FTAF	AR EKSEKUTIFR ISI	. ii .iii
I. 2 Tugas Pokok dan Fungsi I. 2.1 Struktur Organisasi I. 3 Sumber Daya Manusia I. 4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan I. 4.1 Sumber Daya Manusia I. 5 Sistematika Laporan I. 6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis I. 6.1 Uraian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 I. 7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 I. 8 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 I. 8 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 II. 9 Uraian Pengukuran Kinerja Tahun 2025 II. 1 Tahapan Pengukuran Kinerja III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja III.2 Pengukuran Capaian Kinerja III.3 1 SK 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK III.3 2 SK 5 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Transportasi angkutan penyeberangan III. 3.3 SK 8 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik sector transportasi ASDP III. 3.4 SK 9 Meningkatnya keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang III. 3.5 SK 10 Meningkatnya keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang III. 3.6 SK 11 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan III. 3.7 SK 12 Meningkatnya Kesedaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan 66			
	iii		
	1		
PEI	KHTISAR EKSEKUTIF. ii AFTAR ISI. iii AFTAR TABEL. v AFTAR GAMBAR. vi AFTAR LAMPIRAN. viii AB I. 1 ENDAHULUAN. 1 I. 1. Latar Belakang. 1 I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi 2 I. 3. Sumber Daya Manusia 5 I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan 5 I. 5. Sistematika Laporan 8 I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis 15 I. 6.1 Uraian Rencana Kerja Tahuna 2025 17 I. 7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 17 I. 8 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 21 AB B II 25 KUNTABILITAS KINERJA 25 II. 1. Tahapan Pengukuran Kinerja 25 II. 2. Pengukuran Capaian Kinerja 25 II. 3. 1 SK 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK 29 II. 3. 2 SK 5 Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi angkutan penyeberangan 33 II. 3. 4 SK 9 Meningkatnya keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang 46 II. 3. 5 SK 10 Meningkatnya keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang 46		
Ι	. 1	Latar Belakang	1
Ι	. 2	Tugas Pokok dan Fungsi	2
	I.2.	1 Struktur Organisasi	2
Ι	. 3	Sumber Daya Manusia	5
Ι	. 4	Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	5
	I.4.	1 Sumber Daya Manusia	5
Ι	. 5	Sistematika Laporan	8
Ι	. 6	Uraian Singkat Perencanaan Strategis	15
	I.6.	1 Uraian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025	17
Ι	. 7	Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
I.	8 U	raian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
BA	B II.		25
AK	UNT	ABILITAS KINERJA	25
I	I.1.	Tahapan Pengukuran Kinerja	25
I	I.2.	Pengukuran Capaian Kinerja	26
	II. 3	. 1 SK 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	29
		3 ,	33
	II. 3	. 4 SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	46
			58
	II. 3	. 6 SK 11 Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	61
	II. 3	. 7 SK 12 Meningkatnya Kesedaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	65
	II. 3	. 8 SK 4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	72
	II. 3	. 9 Alokasi Anggaran Tahun 2025	58

I. 3. 10 Realisasi Anggaran Tahun 2025	58
I. 3. 11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
I. 3. 12 Hambatan dan Kendal	116
III	117
JTUP	117
1 Ringkasan Capaian	117
2 Ringkasan Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Penanggung Jawab	119
 -	II. 3. 10 Realisasi Anggaran Tahun 2025 II. 3. 11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya III. 3. 12 Hambatan dan Kendal III UTUP .1 Ringkasan Capaian

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Daftar pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat	5
Tabel I. 2 Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Bara Periode Renstra 2020-2024	
Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	. 18
Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	. 20
Tabel I. 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025	. 22
Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.	. 27
Tabel II. 2 Perum Damri di Provinsi Papua Barat	. 29
Tabel II. 3 Realisasi RIT Damri sampai dengan Juni 2025	. 31
Tabel II. 4 Rincian Pagu Awal per Sumber Dana	. 105
Tabel II. 5 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025	. 105
Tabel II. 6 Rincian Pagu per Sumber Dana Triwulan II	. 105
Tabel II. 7 Rincian Pagu per Jenis Belanja	. 105
Tabel II. 8 Rincian Revisi Anggaran Tahun 2025 Per Sumber Dana	. 107
Tabel II. 9 Rincian Revisi Anngaran Tahun 2025 Per Jenis Belanja	. 107
Tabel II. 10 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja TA. 2025	. 108
Tabel II. 11 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan TA. 2025	. 109
Tabel II. 12 Perbandingan Pagu dan Realisasi Triwulan I-III Tahun 2025	. 110
Tabel II. 13 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	. 111
Tabel II. 14 Realisasi anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	. 112
Tabel II. 15 realisasi anggaran per sumber dana tahun 2025	. 113
Tabel II. 16 Rincian Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	. 114
Tabel II. 17 Rincian sisa anggaran per sumber dana Tahun 2025	. 114
Tabel II. 18 Rincian Kegiatan Terblokir Tahun 2025	. 114
Tabel II. 19 Rincian Efisiensi Anggaran	. 115
Tabel II. 20 Perbandingan Jumlah kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM	. 116
Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	. 119

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat3
Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan 30
Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas
Gambar II. 3 Grafik capaian IKK pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
Gambar II. 4 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM40
Gambar II. 5 Grafik Capaian IKK Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM43
Gambar II. 6 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang47
Gambar II. 7 Grafik Capaian IKK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin50
Gambar II. 8 Grafik Capaian IKK Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan53
Gambar II. 9 Grafik Capaian IKK Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan56
Gambar II. 10 Grafik Capaian IKK Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah59
Gambar II. 11 Grafik Capaian IKK Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis
Gambar II. 12 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda
Gambar II. 13 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda
Gambar II. 14 Grafik Capaian IKK Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat73
Gambar II. 15 Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat76
Gambar II. 16 Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan79
Gambar II. 17 Grafik Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat83
Gambar II. 18 Grafik Capaian IKK Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan86
Gambar II. 19 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
Gambar II. 20 Grafik Capaian IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen93

Gambar II. 21 Grafik Capaian IKK kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	€
Gambar II. 22 Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa) 9
Gambar II. 23 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) u kerja10	
Gambar II. 24 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 – Tahun 2025	
Gambar II. 25 Grafik Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 202511	.3

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 3. Rencana Aksi Tahun 2025;
- 4. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2025;
- 6. Monitoring Rencana Akasi Tahun 2025.







PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Untuk menunjang penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi kepada masyarakat dan rakyat. Selain itu, akuntabilitas publik juga diperlukan sebagai tolak ukur fluktuasi dan perbandingan kinerja suatu instansi disetiap tahunnya.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Monitoring Capaian Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dan anggaran dari indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja berdasarkan siklus anggaran yang berjalan per tiga bulan. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Dalam pembuatan Laporan Monitoring Capaian Kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu Laporan Monitoring Capaian Kinerja yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 3 (tiga) bulan anggaran juga menjadi dasar untuk membuat LKIP pada akhir Tahun.

I. 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai,danau dan penyeberangan.
- 2) Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah :
 - a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b) pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
 - c) pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
 - d) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalulintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
 - e) pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;

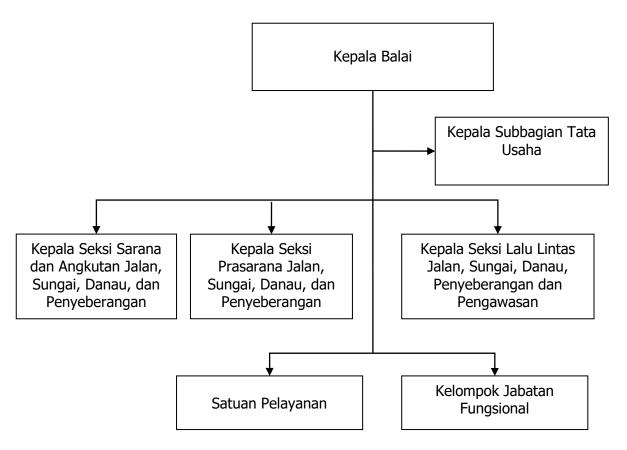
I.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan BPTD kelas II.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdiri dari :

- 1. Subbagian Tata Usaha;
- 2. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
- 4. Seksi PrasaranaJalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia,hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipandan dokumentasi, pelayanan informasi publik,perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasimoda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

- 3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaianfisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
- 4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri,penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I. 3 Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Tahun 2025 terdapat 148 orang dengan rincian 67 Orang PNS, 43 Orang PPPK dan 38 Orang tenaga outsourcing dengan rincian penempatan sebagai berikut:

Tabel I. 1 Daftar pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

No	Nama Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala Balai	1 orang
2	Subbagian Tata Usaha	39 Orang
3	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan	16 orang
	Penyeberangan	
4	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan	20 orang
	Penyeberangan	
5	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan,	18 orang
	dan Pengawasan	
6	Satuan pelayanan (SATPEL)	
	1) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Klademak	17 orang
	2) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Arar	13 orang
	3) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Marampa	5 orang
	4) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Folley	1 orang
	5) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Waigeo	4 orang
	6) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Salawati	6 orang
	7) Satpel Pelabuhan Penyeberangan Batanta	8 orang
	Total	148 orang

I. 4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

- a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 1) Terkait prasarana jalan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009
 - Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.
- c. PM No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
- 6) Pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
- 7) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan
- 8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian perhubungan.

I.4.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai di lingkungan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat masih sangat banyak, mengingat wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan Balai dengan 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat dan juga banyak terdapat Satuan Pelayanan.

I.4.1. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat karena terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pemotongan anggaran.

I.4.2. Isu Strategis

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

- 1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
- 2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
- 3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
- 4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
- 5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
- 6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
- 7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

I.4.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat adalah:

- 1. Rencana Strategis
- 2. Perjanjian Kinerja

- 3. Indikator Kinerja Kegiatan
- 4. Pengukuran Kinerja
- 5. Evaluasi Kinerja

I. 5 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.3.1 SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK
 - 1. IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
 - II.3.2 SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan
 - 1. IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 2. IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- II.3.3 SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP
 - 1. IKK 8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
 - 2. IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- II.3.4 SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang
 - 1. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 3. IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 4. IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- II.3.5 SK 10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety
 - IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.6 SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan

- 1. IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.7 SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan

- 1. IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 2. IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.8 SK4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

- 1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

- 6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 9. IKK 4.9 Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang
- 10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

II.3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2025

- 1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- 2. Refocusing Anggaran Tahun 2025
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025
- 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024-2025

II.3.10. Realisasi Anggaran Tahun 2025

- 1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025
- 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
- 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
- 4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.11. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
- 2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (Tabel Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Jumlah Eksisting SDM)
- 3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

- III.1 Ringkasan Capaian
- III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;

- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 3. Rencana Aksi Tahun 2025;
- 4. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2025;
- 6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025.

I. 6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029 saat ini masih dalam proses perumusaan sehingga pada laporan ini masih menggunakan Rencana Strategis periode 2020-2024 dan akan dilakukan perbaikan jika sudah ada RENSTRA terbaru.

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Target capaian kinerja maupun rencana inventarisasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Tahun 2020-2020 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan jalan yang handal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun kedepan.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua BaratTahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I. 2 Target Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Periode Renstra 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda	IKK1.1 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
	transportasi	IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan	Lokasi	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indika	tor Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			antarmoda			
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	-	-
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	<u>-</u>	100
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	5	8
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	-	-
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-	-
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	-	-
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	-	2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Baseline 2019	Target S.D 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		IKK3.4		Lokasi	-	-
		IKK3.5	taman edukasi Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-	500
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100
		IKK4.7	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-	-
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90
5.	SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	90

I.6.1 Uraian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan turunan dari Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan target per tahun berjalan. Pada Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat memiliki Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut:

Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

NO.	S	ASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	IN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1.	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I. 7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai turunan dari program kerja Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Tahun anggaran 2025 Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat berdasarkan Renstra terdapat 5 Sasaran Kegiatan dan 9 Indikator Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.243.346.000,-. Adapun uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
3.	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
4.	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KE	GIATAN	ANGGARAN		
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000	
2.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000	
3.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000	
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000	

I.8 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Bulan Juli terdapat Revisi Perjanjian Kinerja karena adanya pergantian pimpinan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan adanya perubahan pada indikator Kinerja menyesuaikan dengan konsep Renstra periode 2025-2029.

Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdapat 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.243.346.000,-. Adapun uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
5.	SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	23
6.	SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1
			IKK6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5
3.	SK8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	2
			IKK8.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7
4.	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6
			IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
			IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4
			IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1
5.	SK1	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6
6.	SK1	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3.593
7.	SK1	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400
			IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100
8.	SK4	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi	Dokumen	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INI	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
			Audit/Pemeriksaan		
		IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6
		IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
		IKK4.9	Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3
		IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3

KE	CGIATAN		ANGGARAN
5.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000
6.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000
7.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000







BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat http://www.eperformance.dephub.go.id dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal. Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

 Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian Kinerja =
$$\left(\frac{Realisasi}{Target PK}\right) x 100 \%$$

 Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Kinerja =
$$\frac{\left(Target - (Realisasi - Target)\right)}{Target} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025. Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

II.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target perjanjian kinerja dengan capaian Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat maka diperoleh data Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan III adalah sebesar 61,87%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III terdapat perubahan indikator Kinerja Kegiatan karena menyesuaikan dengan konsep Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat periode 2025-2029. Adapun pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan III adalah sebagai berikut:

				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK											
IKK 2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	%	23	23	23	100%	23	23	100%	23	23	100%
SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan											
IKK5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas		1	1	0	0%	1	0	0%	1	0	0%
IKK6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%
SK8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP											
IKK 8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%
IKK8.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%
SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang											
IKK9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	6	2	33,3%	6	3	50%	6	3	50%
IKK 9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	5	0	0%	5	2	40%	5	2	40%
IKK 9.6	Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	4	0	0%	4	1	25%	4	2	50%
IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	0	0%	1	0	0%	1	1	100%
SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety											
IKK 10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	6	0	0%	6	0	0%	6	0	0%
SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan											

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		SATUAN	TARGET	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3.623	3.623	3.385	94,2%	3.623	3.385	94,2%	3.623	3.593	99%
SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamata	n						L	<u>l</u>			
IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	400	0	0%	400	0	0%	400	0	0%
IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda		100	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%
SK4	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal			I.				L				
IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	1	33.3%	3	2	67%	3	2	67%
IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	0	0%	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	2	0	0%	2	1	50%	2	2	100%
IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat		1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	6	6	2	33,3	6	2	33,3%	6	3	50%
IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK4.9	Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	3	1	33,3%	3	1	33,3%	3	2	67%
IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja Kegiatan		3	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	
Rata-Rata F	Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					40,32%			51,86%			61,87
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						7			8			10
Jumlah Ind	ikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)					16			15			13

Jika dilihat lebih detail pada Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja dari 23 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat,terdapat 10 (sepuluh) IKK yang yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%) dan 13 (tiga belas) IKK kurang dari 100% (0%≤IKK<100%). Penjelasan capaian IKK untuk setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

II. 3. 1 SK 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan. Dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat melaksanakan subsidi ke 3 cabang terminal Damri yang berada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Adapun 3 cabang damri tersebut adalah:

Tabel II. 2 Perum Damri di Provinsi Papua dan Papua Barat

No	Nama Perum	Jumlah Trayek
1	Damri Cabang Sorong	7 Trayek
2	Damri Cabang Sorong Selatan	10 Trayek
3	Damri Cabang Manokwari	6 Trayek
Tota	n Trayek	23 Trayek

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 23 trayek jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 sebanyak 23 Trayek maka capaian kinerja mencapai 100% Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 1 Grafik Capaian IKK Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025. Dalam Surat Keputusan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) jaringan trayek dari 3 cabang Damri dibawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan target 23 Trayek yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

• Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan antara lain:

- Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanankeperintisan angkutan jalan.
- 2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum.
- 3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang murah.

• Potensi Kegagalan

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan memiliki capaian kinerja 31,80%. Terdapat potensi kegagalan yang dapat disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut :

- 1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
- 2. Trayek tidak dapat beroperasi karena ruas jalan pada trayek tersebut rusak.
- 3. Usia kendaraan yang sudah tua dan adanya kelangkaan BBM.

Perhitungan Realisasi Kinerja Capaian Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

Tabel II. 3 Realisasi RIT Damri sampai dengan September 2025

					Ritase	
No Cabang Damri			Trayek	Target	Realisasi s.d. September 2025	Sisa
1	2		3	4	5	
PRC	VINSI PAPUA BARA	\Τ	<u>'</u>			
		1)	Sorong - Seget	286	60,5	225,5
		2)	Sorong - Klasari	286	180	106
		3)	Sorong - Arar	286	164,5	121,5
1	SORONG	4)	Sorong - Batu Payung - Klawak	286	177,5	108,5
		5)	Sorong - Saoka	286	170	116
		6)	Inam - Kebar - Mia	286	139	147
			Sorong-Klafdalin	286	157,5	128,5
			Jumlah	2.002	1.049	953
		1)	Teminabuan - Seremuk	286	176	110
		2)	Teminabuan - Moswaren	286	180	106
		3)	Teminabuan - Wayer	286	176	110
2	SORONG SELATAN	4)	Teminabuan - Sasnek	286	186	100
		5)	Teminabuan - Aitinyo	286	184,5	101,5
		6)	Teminabuan - Ayamaru	286	182	104
		7)	Kajase - Konda	286	172,5	113,5

				Ritase	Ritase	
No	Cabang Damri		Trayek	Target	Realisasi s.d. September 2025	Sisa
1	2		3	4	5	
		8)	Kajase - Pasir Putih	286	186,5	99,5
		9)	Kajase - Haemaran - Joksiro	286	184	102
		10)	Kajase - Waihali	286	178,5	107,5
			2.860	1.806	1.054	
		1)	Manokwari - Arfu	286	173	113
	MANOKWARI	2)	Manokwari - Saray	143	91	52
3		3)	Manokwari - Sidey	286	173	113
		4)	Manokwari - Masni	286	173	113
		5)	Manokwari - Momiwaren	286	173	113
		6)	Momiwaren - Ransiki	286	173	113
			Jumlah	1.573	956	617
	Total Provinsi	Papu	6.435	3.811	2.624	

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa realisasi ritase subsidi angkutan jalan perintis sebanyak 3.811 dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebanyak 6.435 dan sisa ritase yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2025 adalah 2.624. Untuk perhitungan realisasi kinerja yang dihitung adalah jumlah trayek yang beroperasi sampai dengan Triwulan III maka realisasinya adalah 23 Trayek dimana sesuai dengan target yang di tetapkan sebanyak 23 trayek dan semua beroperasi

Realisasi Kinerja = Jumlah Trayek realisasi pada tahun (n)

Realisasi Kinerja = 23 Trayek

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, realisasi trayek sampai dengan triwulan III jika dibandingkan dengan target Trayek dalam 1 (satu) tahun dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan yakni 23 Trayek.

Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja

Capaian Kinerja =
$$\frac{Realisasi}{Target}$$
 x100 %

Capaian Kinerja =
$$\frac{23}{23}$$
X100 = 100 %

Berdasasarkan perhitungan capaian kinerja Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan dimana target yaitu 23 Trayek kemudian realisasi sebesar 23 trayek sesuai dengan rumus yang digunakan yaitu realisa dibagi target maka capaian yang di peroleh yaitu 100%.

Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Layanan subsidi Transportasi Angkutan Jalan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 6.436.860.143,-dan realisasi anggaran hingga akhir Triwulan III sebesar Rp. 3.821.877.095. atau sebesar 59,37% dari nilai kontrak.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - 1. Mengadakan pemeriksaan rutin armada minimal 3 (tiga) bulan sekali, agar apabila terjadi kerusakan pada armada dapat segera ditangani dan bisa melakukan pelayanan secara maksimal.
 - 2. Menghimbau kepada Perum Damri yang memiliki armada Bus yang mengalami kerusakan agar melakukan perbaikan dan pemeriksaan secara rutin.
 - 3. Melakukan persiapan addendum terkait target ritase.

II. 3. 2 SK 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan

Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan. Sasaran kegiatan ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang akan di jelaskan sebagai berikut.

1. IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah jumlah pelabuhan penyeberangan yang saat ini dalam proses pembangunan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya. Pada Tahun 2025 terdapat 1 (satu) kegiatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan yaitu pembangunan pelabuhan penyeberangan Kaimana Tahap IV di Kabupaten Kaimana.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kegiatan Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalan 1 (satu) Unit dan Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah 0 Unit. Kegiatan belum dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga sampai saat ini anggaran pembangunan pelabuhan Kaimana tahao IV masih terblokir. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas

a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dasar Hukum

Pada PM 91 Tahun 2021 disebutkan bahawa Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui penyeberangan maka di perlukan fasilitas yang memadai slah satunya adalah adanya pelabuhan penyeberangan.

Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas memiliki target 1 (satu) Unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Dalam pelaksanaannya terdapat Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah sebagai berikut :

- 1. Perencanaan yang baik dan kelengkapan dokumen sebelum dilakukan pembangunan;
- 2. Kebutuhan masyarakat sekitar terhadap ketersediaan fasilitas yang dapat membantu aktivitas sehari-hari;
- 3. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak Balai Pengelola Transportasi darat Kelas II Papua Barat Daya dangan penyedia atau kontraktor.

Faktor kegagalan

Dalam pelaksanaannya juga terdapat faktor kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas adalah sebagai berikut :

- Ketersediaan anggaran yang belum pasti mengingat saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran;
- 2. Saat ini anggaran masih di blokir sehingga kegiatan belum bias dilaksanakan;
- 3. Terdapat sisa kegiatan tahap sebelumnya yang masih belum dilaksanakan.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja yakni sebagai berikut :

Realisasi = realisasi jumlah pelabuhan yang sedang dibangun

Capaian kinerja

Perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja =
$$\left(\frac{Realisasi}{Target}\right) x$$
 100 %

Capaian Kinerja = $\frac{0}{1}x100\% = 0\%$

Pagu, realisasi dan capaian keuangan

Pagu anggaran kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana adalah sebesar Rp. 17.000.000.000 dan realisasi anggaran hingga saat ini adalah 0 karena sampai saat ini anggaran kegiatan masih di blokir sehingga tidak dapat digunakan sehingga capaian keuangan juga masih 0%.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - 1. Melakukan koordinasi kebagian anggaran Sesditjen terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor terkait pelaksanaan kegiatan;
 - 3. Melakukan persiapan dokumen dan data dukung jika kegiatan tidak dapat dilaksanakan Tahun ini maka akan di alihkan ke Tahun berikutnya.

2. IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP dihitung dari jumlah pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan yang terdapat di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya. jumlah pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan jumlah pelayanan keperintisan yang terlayani. Dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat melaksanakan subsidi ke 5 pelayanan keperintisan yang terbagi dalam 2 cabang PT ASDP yaitu PT ASDP Cabang Sorong dan PT ASDP Cabang Biak.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Realisasi kinerja pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% dimana dari 5 Trayek keperintisan angkutan penyeberangan, semuanya beroperasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 sebesar 5 Trayek maka capaian kinerja mencapai 100 % Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini :



Gambar II. 3 Grafik Capaian IKK pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dasar Hukum

Sesuai surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 3904 Tahun 2022 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis. Dalam Surat Keputusan tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) nama lintas di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat yang terbagi dalam 5 Trayek dan 2 Cabang PT ASDP.

Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP memiliki target 5 Trayek yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

• Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP antara lain:

- 1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat
- 2. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir

- 3. Kepastian jam operasioanal Keperintisan Angkutan Penyeberangan
- Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang beroperasi melayani masyarakat

Faktor kegagalan

Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dapan menyebankan kegagalan tercapainya kegiatan Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP. Adapun penyebab kegagalan dalam memenuhi realisasi kinerja dan capaian kinerja yakni :

- 1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
- 2. Dokumen terkait tagihan mengalami banyak perubahan sehingga harus dilakukan beberapa prosedur sebelum pencairan seperti addendum dan lain-lain;
- 3. Adanya kerusakan kapal sehingga mengganggu pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan;
- Realisasi Kinerja
 Perhitungan Realisasi Kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja yakni sebagai berikut :

$$Realisasi = \left(\frac{Realisasi\ Trip}{Target\ Trip}\right) x\ 100\ \%$$

Realisasi Kinerja =
$$\frac{1.105}{1.538}$$
x100 = 71,84%

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024 terdapat 30 kabupaten pada wilayah kerja BPTD Kelas II Papua dan BPTD Kelas II Papua Barat yang termasuk dalam daerah tertinggal, namun hanya 12 kabupaten yang memiliki wilayah perairan dengan 5 diantaranya sudah terlayani keperintisan angkutan penyeberangan.

Capaian Kineja

Perhitungan capaian kinerja yakni sebagai berikut :

Capaian Kinerja =
$$\left(\frac{Realisasi}{Target\ PK}\right) x\ 100\ \%$$

Capaian Kinerja =
$$\frac{5}{5}$$
X100 % = 100 %

Dari 5 lintasan perintis angkutan penyeberangan, seluruh lintasan dilayani sehingga capaian persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan adalah 100%.

- Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
 Adapun anggaran terkait Jumlah Layanan Subsidi transportasi
 Angkutan ASDP yaitu senilai Rp. 28.382.748.000,- dengan realisasi
 anggaran hingga akhir Triwulan III sebesar Rp. 14.310.939.427, atau sebesar 50,42 % dari total anggaran.
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - 1. Mengadakan pemeriksaan rutin KMP minimal 3 (tiga) bulan sekali, agar bila terjadi kerusakan pada KMP dapat segera ditangani dan bisa melakukan pelayanan secara maksimal;
 - 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keperintisan penyeberangan;
 - 3. Diperlukan pembangunan pelabuhan penyeberangan sehingga lintasan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dapat bertambah.

II. 3. 3 SK 8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP

Sasaran kegiatan Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM dan Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM. Adapun penjelasan kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKK 8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM adalah rehabilitasi, perbaikan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan pada wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya. Adapun pelabuhan penyebrangan yang dilakukan rehabilitasi, perbaikan dan peningkatan ada 2 (dua) unit yaitu pelabuhan Klademak dan Pelabuhan Arar.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sampai saat ini masih 0 dari target yang di rencanakan sebanyak 2 (dua) unit. Kegiatan masih dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan pada triwulan III. Adapun capaian kinerja kegiatan IKK8.1 dapat digambarkan pada grafik berikut:



Gambar II. 4 Grafik Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat nomor SP DIPA-22.03.2.403867/2025 terdapat 2 (dua) unit pelabuhan penyeberangan yang di rehabilitasi, perbaikan dan peningkatan yautu pelabuhan penyeberangan Klademak dan Pelabuhan Penyeberangan Arar.

Kronologi Target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM memiliki target 2 Unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor keberhasilan yang mendukung tercapaianya kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM. Adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi, perbaikan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan;
- 2. Tim yang solid dan bekerja sama dengan baik;
- 3. Perencanaan yang baik sebelum melakukan perbaikan dilakukan inventarisasi dan survey kebutuhan.

• Faktor kegagalan

Selain faktor kenerhasilan juga terdapat faktor kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM sebagai berikut:

- 1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2. Ketersediaan bahan baku perbaikan;
- 3. Kurangnya Tenaga kerja yang handal dan kompeten dalam pelaksanaan kegiatan.

• Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM. Target kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM adalah 2 unit namun realisasi kegiatan sampai Triwulan II masih 0 karena kegiatan belum dilaksanakan.

Realisasi Kinerja IKK8.1

= Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang di tingkatkan pelayanannya

untuk memenuhi SPM s.d tahun (n)

Realisasi Kinerja IKK8.1 = 0

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM pada tahun ini sebanyak 0 unit atau kegiatan belum dilaksanakan maka capaiannya adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

= Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM i target Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi x100%

Capaian Kinerja = $0/2 \times 100\% = 0\%$

Pagu realisasi dan capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM yaitu senilai Rp. 372.724.000,- dan belum terdapat realisasi anggaran sampai denga triwulan III.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 1. Mempersiapkan dokumen pendukung agar pada saat pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- 2. Melakukan koordinasi dengan bagian anggaran terkait ketersediaan anggaran kegiatan;
- 3. Melakukan monitoring dan inventarisasi kebutuhan pelabuhan yang akan di rehabilitasi, perbaiakan dan ditingkatkan pelayanannya.

2. IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM dihitung dari jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 sebanyak 7 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebanyak 7 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100 % pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 4 Grafik capaian IKK Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 5 Grafik capaian IKK Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intradan/atau antarmoda transportasi.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 7 lokasi pelabuhan yang sedang beroperasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong:
- 2. Pelabuhan Penyeberangan Arar Kab. Sorong;
- 3. Pelabuhan Penyeberangan Marampa Manokwari;
- 4. Pelabuhan penyeberangan Folley Kab. Raja Ampat;
- 5. Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat;
- 6. Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat;
- 7. Pelabuhan Penyeberangan Waigeo Kab. Raja Ampat.

Kronologi target

Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebanyak 7 lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan dimana pada Tahun sebelumnya target Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebanyak 8 Lokasi namun karena salah satu pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Wasior sudah diserahkan ke Pemda makan tahun ini target Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM menjadi 7 Lokasi.

• Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

- 1. Petugas yang kompeten dibidangnya
- 2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
- 3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja

Potensi Kegagalan

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM mengalami keberhasilan, dimana target kegiatan adalah 100 %. Meskipun capaian kinerja memenuhi target 100%, namun terdapat potensi kegagalan dalam memenuhi realisasi kinerja dan capaian kinerja yakni:

- 1. Terdapat efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal;
- 2. Kondisi fasilitas pelabuhan yang masih kurang memadai;
- 3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi dalam penandatangan dokumen berlayar.

Perhitungan Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian indikator kinerja dan realisasi kinerja Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja IKK8.2 =

Jumlah Operasional layanan pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM s.d tahun (n)

Realisasi Kinerja IKK8.2 = 7

Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM pada tahun ini sebanyak 7 Lokasi.

Capaian Kinerja

 $= \frac{\text{Jumlah Operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM}}{\text{target jumlah Operasional layanan pelabuhan penyeberangan sesuai SPM}} x 100\%$

Capaian Kinerja = $7/7 \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja dapat diketahui bahwa capaian kinerja Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM sebesar 100%.

Pagu, realisasi, dan capaian keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM Tahun 2025 yaitu Pagu sesuai Revisi 11 senilai Rp. 1.948.809.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 1.100.374.671 atau sebesar 56,46 % dari total anggaran.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM di masa yang akan datang Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan para coordinator satuan pelayanan pelabuhan penyeberangan yang beroperasi agar kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana;
- 2. Memenuhi kebutuhan setiap satuan pelayanan seperti kebutuhan alat tulis, SDM dan perlengkapan lainnya;
- 3. Melakukan revisi anggaran jika terdapat satuan pelayanan yang memerlukan anggaran yang lebih banyak;
- 4. Meningkatkan kualitas SDM di pelabuhan penyeberangan seperti mengikuti Diklat yang terkait dengan pelabuhan penyebrangan.

II. 3. 4 SK 9 Meningkatnya keselamatan angkutan penumpang dan barang

Sasaran kegiatan Meningkatnya keselamatan angkutan penumpang dan barang memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

- 1. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang
- 2. IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin
- 3. IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan
- 4. IKK 9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Adapun penjelasan terkait 4 (empat) indicator tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKK 9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengangkutan barang di jalan memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kelaikan kendaraan, muatan, dimensi kendaraan, dokumen kendaraan, dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dalam hal ini pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang terbagi dalam dua kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya dan Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 6 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 50 % pencapaian ini digambarkan pada Gambar II. 6 Grafik capaian IKK Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 6 Grafik Capaian IKK Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 60 Tahun 2019 angkutan barang adalah perpinhan barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Kronologi Target

Target kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang sebanyak 6 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

• Faktor Keberhasilan

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan pihak terkait seperti dinas perhubungan provinsi dan dinas perhubungan kota Sorong serta pihak kepolisian;

- 2. Kesadaran dari masyarakat akan penting keselamatan dalam transportasi;
- 3. Ketersediaan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor.

Potensi Kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat factor kegagalan Dalam pelaksanaannya kegiatan Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang. Adapun factor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya pemahaman supir kendaraan terkait peraturan keselamatan angkutan barang yang berlebih;
- 2. Kurangnya fasilitas jembatan timbang dan alat ukur kendaraan bermotor;
- 3. Sanksi yang kurang efektif sehingga tidak memberi efek jerah terhadap pelaku Odol.

Realisasi Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja IKK9.2 = Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang s.d tahun (n)

Realisasi Kinerja IKK9.2 = 3

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang sebesar 3 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

 $= \frac{\text{Realisasi Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang}}{\text{Target Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang}} \ x 100\%$

Capaian Kinerja =
$$\frac{3}{6}$$
 x100 = 50%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang yakni 50%.

Realisasi keuangan

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 750.000.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp.92.736.000 atau sebesar 12,36 % dari total anggaran.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - Melakukan sosialisasa kepada masyarakat akan dampak buruk kelebihan muatan maupun kelebihan dimensi pada angkutan barang;
 - 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat khusunya bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - 3. Memberikan sanksi yang berat agar memberi efek jerah pada kedaraan odol.

2. IKK 9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin

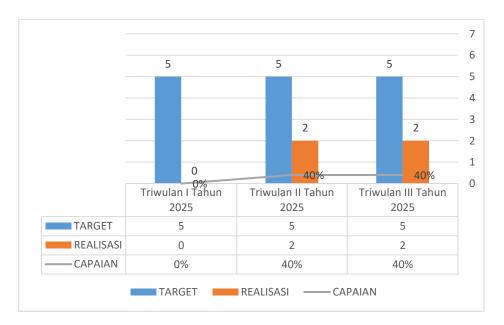
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pengawasan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan, rencana, dan tindakan dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas, dan lalu lintas efisiensi, keamanan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Pengawasan evaluasi Andalalin adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil **Analisis** Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan atau usaha yang mendapatkan persetujuan Andalalin beroperasi sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lalu lintas.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin sampai dengan Triwulan III adalah sebanyak 2 kegiatan jika dibandingkat dengan target kegiatan sebanyak 5 kegiatan maka

capaian kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin adalah sebesar 40%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 7 Grafik Capaian IKK Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 96 Tahun 2015 Manajemen rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usahan dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam mewujudkan mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan PM 17 Tahun 2021 analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegaitan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan.

Kronologi target

Target kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin sebanyak 5 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang baik terkait lokasi dilaksanakannya Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin;

- 2. Kesadaran dari seluruh pihak akan pentingnya pengaturan lalu lintas:
- 3. Kerja sama yang baik antara semua pihak dalam pelaksanaan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin seperti pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, dan masyarakat umum.

• Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) dan Andalalin. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait;
- 2. Kondisi jalan atau lokasi andalalin yang sulit untuk dilakukan evaluasi;
- 3. Kurangnya sumberdaya manusia yang kompeten di bidang andalalin.
- Realisasi kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK9.5 = Jumlah Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin s.d Triwulan II

Realisasi Kinerja IKK9.5 = 2

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin sebesar 2 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin}}{\text{Target Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin}} \times 100\%$

Capaian Kinerja = $\frac{2}{5}$ x100 = 40%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin yakni 40%.

• Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan pengawasan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 394.620.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 37.993.000 atau sebesar 9,63 % dari total anggaran.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang kegiatan Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin adalah:
 - 1. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan pihak terkait;
 - 2. Melakukan monitoring atau pemantauan secara langsung pada lokasi kegiatan pengawasan MRLL dan Andalalin;
 - 3. Memberikan sosialisasi terkai andalalin kepada pengusaha atau masyarakat yang akan membuat gedung atau fasilitas yang lain.

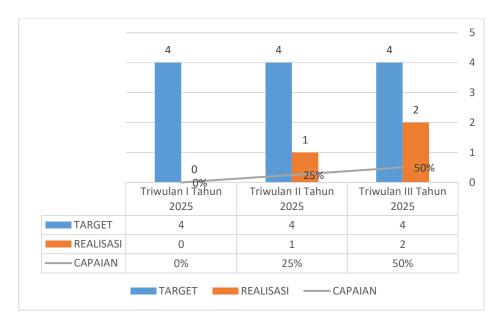
3. IKK 9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan adalah proses penting dalam memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ini melibatkan pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap berbagai fasilitas jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan, dan lainnya, untuk memastikan mereka berfungsi dengan baik dan sesuai standar.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan sebanyak 4 kegiatan dan sampai dengan Triwulan III sudah terealisasi sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga capaian kinerja kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan adalah sebesar 25%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 8 Grafik Capaian IKK Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 48 Tahun 2023 Alat pengendali Pengguna Jalan digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas Jalan. Perlengkapan yang dimaksud dapat berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
- f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Kronologi target

Target kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan sebanyak 4 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya kegiatan kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang baik dapat membantu memastikan keberhasilan pengawasan perlengkapan jalan;

- 2. Tersedianya sumberdaya yang memadaan seperti anggaran, tenaga kerja dan peralatan;
- 3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, kontraktor dan masyarakat.
- Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Terdapat perbedaan dokumen dengan kenyataan di lapangan;
- 2. Ketersedian sumber daya manusia yang handal di bidang perlengakapan jalan;
- 3. Tersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- Realisasi kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK9.6 =

Jumlah Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan s.d Triwulan III

Realisasi Kinerja IKK9.6 = 2

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan sebesar 1 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan}}{\text{Target Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan}} \times 100\%$

Capaian Kinerja = $\frac{2}{4}$ x100 = 50%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan yakni 50%.

• Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 429.856.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 53.692.000 atau sebesar 12,49 % dari total anggaran.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang kegiatan Pengawasan dan evaluasi perlengkapan jalan adalah:
 - 1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak penyedia atau kontraktor tekait pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - 2. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang perlengkapan jalan;
 - 3. Melakukan perencanaan yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4. IKK 9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan adalah proses untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan peralatan yang terkait dengan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan lampu jalan, berfungsi dengan baik dan dipelihara secara teratur. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan pengguna jalan. Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan dihitung dari jumlah Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan adalah 1 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III adalah 1 kegiatan maka capaian kegiatan sampai saat ini masih 100 %. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 9 Grafik Capaian IKK Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 48 Tahun 2023 Pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dilakukan secara berkala dan incidental. Pemeliharaan berkala dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkat pemeliharaan secara incidental dilakukan jika ditemukan adanya kerusakan pada alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Kronologi target

Target kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan 1 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan adalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kontrak;
- 2. Ketersediaan anggaran untuk melakukan survey di lokasi kegiatan;
- 3. Koordinasi yang baik dengan pihak kontraktor dan pihak lain agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan alasan ketersediaan bahan baku;
- 2. Adanya effisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana dengan efisien;
- 3. Lokasi pengadaan yang cukup jauh sehingga akses ketempat pelaksanaan kegiatan sedikit sulit.
- Realisasi kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK9.7 =

Jumlah Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalah s. dTriwulan III

Realisasi Kinerja IKK9.7 = 1

• Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan sebesar 1 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

 $= \frac{\text{Realisasi Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan}}{\text{Target Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan}} \ x 100\%$

Capaian Kinerja =
$$\frac{1}{1}$$
 x100 = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan yakni 100%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan Tahun 2025 yaitu senilai

Rp. 84.760.000 hingga akhir September 2025 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 33.214.000 atau sebesar 39,19%.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Kegiatan Pengawasan dan evaluasi pemeliharaan perlengkapan jalan adalah:
 - 1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana;
 - 2. Melakukan perencanaan yang baik agar dimasa yang akan datang tidak terdapat kendala yang berat;
 - 3. Melakukan monitoring terlebuh dahulu sebelum menentuka lokasi pemasangan Faskes.

II. 3. 5 SK 10 : Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety

Sasaran kegiatan Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah. Adapun penjelasan indicator tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keakuratan alatalat uji yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan keandalan hasil pengujian. Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala terbagi dalam 3 kegiatan yaitu:

- Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya;
- 2. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor;
- 3. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah yaitu 6 kegiatan jika dibandingka dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III yaitu 0 atau kegiatan belum dilaksanakan karean anggaran kegiatan yang masih terblokir sehingga capaian kinerja sampai saat ini masih 0%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 10 Grafik Capaian IKK Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar hukum

Berdasarkan PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan yang menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan nya dengan standar/tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yg dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Pada pasal 53 ayat (1) "Untuk menjamin keakurasian peralatan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Kronologi target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah memiliki target 6 kegiatan yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah adalah sebagai berikut:

- Adanya permintaan dari Dishub Kab/ Kota untuk dilaksanakannya standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 2. Kelengkapan Alat uji yang akan di kalibrasi.
- 3. Peralatan yang akan di uji sudah terstandar.

Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai dan belum dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
- 2. Belum adanya SDM kompeten untuk menangani pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 3. Fasilitas penunjang pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum lengkap.

• Realisasi kinerja

Realisasi pelaksanaan kegiatan Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja IKK10.2 =Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah s.d tahun (n)

Realisasi Kinerja IKK10.2 = 0

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui untuk realisasi kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah yakni sebesar 0.

Capaian Kinerja

Capaian Kinerja

 $=rac{Realisasi Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah}{Target Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah} x 100\%$

Capaian Kinerja =
$$\frac{0}{6}$$
X100 = 0 %

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah yakni 0%.

- Pagu realisasi capaian anggaran
 Adapun anggaran terkait Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 500.000.000 hingga akhir September 2025 belum terdapat realisasi anggaran.
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat berencana melakukan pinjam pakai mobil uji keliling kepada pengujian yang sudah terakreditasi agar bisa menghasilkan BLUe dan mendorong pengujian untuk mengadakan system BLUe;
 - 2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan kalibrasi dan akreditasi agar beberapa kabupaten yang belum memiliki alat uji terdorong untuk melakukan pengadaan alat uji;
 - Meningkatkan kompetensi SDM petugas yang akan melaksanakan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

II. 3. 6 SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan

Sasaran kegiatan Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis. Adapun penjelasan indicator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis

a.1. Definisi Indikator Kinerja Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, penerangan jalan, serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Fasilitas ini penting untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KU.001/1/12/DJPD/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan kontraktual tidak dapat terlaksana. Pada Tahun 2025 BPTD Kelas II Papua barat hanya melaksanakan dua kegiatan pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan yaitu pengadaan dan pemasangan paku jalan Bulat (Tempered) dan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Guadrail).

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis sebanyak 3623 Unit jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 3.593 unit maka capaian kinerja mencapai 99,17% Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 11 Grafik Capaian IKK Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis

Dasar Hukum

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur LaluLintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas

Kronologi target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis memiliki target 3.623 Unit yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis antara lain:

- 1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca;
- 2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
- 3. Ketersediaan bahan baku faskes yang akan dipasang.

Faktor kegagalan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat potensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis. Potensi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Perlengkapan jalan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan, jumlahnya banyak sedangkan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan perlengkapan jalan, terbatas;
- Suplai bahan material dan logistik terlambat;
- 3. Keterlambatan penyiapan dokumen pendukung dari pemerintah daerah untuk realisasi kegiatan bantuan teknis perlengkapan jalan.

Realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK11.1 =

Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan s.d tahun (n)

Realisasi Kinerja IKK11.1 = 3.593 Unit

Dari perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui untuk realisasi kinerja Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis sebanyak 3.593 Unit

Capaian kinerja

Perhitungan capaian kinerja yakni sebagai berikut:

% Capaian kinerja

 $= \frac{\text{realisasi pengadaan dan pemasangan Faskes}}{\text{Target pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan}} \times 100\%$

% Capaian kinerja =
$$\frac{3.592}{3.623}$$
 X 100 = 99,17%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis yakni 94%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun total Pagu anggaran untuk Kegiatan Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis yaitu sebesar Rp. 5.947.727.155 dengan realisasi anggaran hingga Triwulan III sebesar Rp 4.030.668.889 atau sebesar 67,77% dari total nilai kontrak.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pencapaian kinerja lebih optimal;
 - 2. Melakukan pengawasan yang baik terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan;
 - 3. Mempersiapkan rencana kebutuhan kegiatan pengadaan dan pemasangan faskes ditahun yang akan datang.

II. 3. 7 SK 12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan

Sasaran kegiatan Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

- 1. IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda
- 2. IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

Adapun penjelasan terkait IIK tersebut adalag sebagai berikut:

1. IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

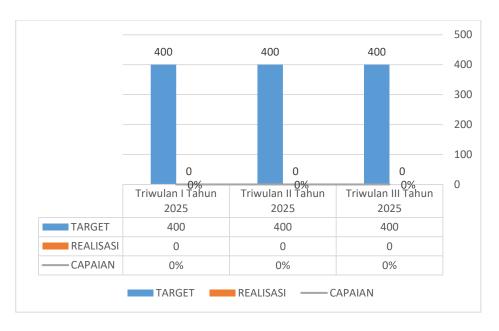
Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda sebanyak 400 Orang jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 0 Orang maka capaian kinerja mencapai 0% Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 12 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

Realisasi kinerja kegiatan jumlah masyarak yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat masih 0 karena pada rencana aksi Tahun 2025 kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September 2025.

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar hokum

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b "Sosialisasidan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintasdan angkutan jalan.

Kronologi target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda memiliki target 400 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

• Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

1. Tingginya pengguna Jasa Angkutan Umum;

- 2. Petugas dipelabuhan penyeberangan menyampaikan informasi keselamat di lingkungan pelabuhan penyeberangan sebelum kapal berangkat;
- 3. Petugas Menyampaikan informasi dengan Jelas dan singkat.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

- Terdapat effisiensi anggaran sehingga sampai saat ini anggaran kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda sampai saat ini masih terblokir;
- 2. Tidak tersampaikannya informasi keselamatan karena penumpang tidak memperhatikan
- 3. Kemungkinan Petugas tidak ada di tempat saat Bus akan berangkat

Realisasi kinerja

Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat kegiatan Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda akan dilaksanakan pada bulan September 2025

Realisasi Kinerja Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda Tahun 2025 Triwulan III terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja

= Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ

 $Realisasi\ Kinerja=0$

Capaian kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat adalah 0 orang

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Jumlah masyarakat Tersosialisasi}}{\text{Target Masyarakat Tersosialisasi}}$

Capaian Kinerja =
$$\frac{0}{400}$$
 X 100 = 0 %

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja untuk Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi darat yakni 0%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan total Pagu yaitu Rp. 300.000.000 namun pelaksanaan kegiatan masih menunggu hasil efisiensi anggaran apakah kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat akan melakukan pengusulan untuk kegiatan sosialisasi tentang keselamatan Transportasi Darat yang lebih besar dengan sasaran masyarakat yang lebih luas.
 - 2. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 3. Mengoptimalkan sosial media sebagai sarana promosi kegiatan dan sarana penyebaran informasi terkait keselamatan transportasi darat.

IKK12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda merupakan pendidikan sadar lalu lintas usia dini, sering disebut SALUD. SALUD adalah upaya memberikan pemahaman tentang aturan lalu lintas dan pentingnya keselamatan di jalan kepada anak-anak sejak usia dini. Program ini bertujuan membentuk karakter anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas, serta menanamkan kebiasaan baik yang akan terbawa hingga dewasa.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda sebanyak 100 Orang jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 0 Orang maka capaian kinerja mencapai 0% pencapaian ini digambarkan pada Gambar



Gambar II. 13 Grafik Capaian IKK Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar hukum

Berdasarka UU Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 208 bahwa upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
- e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Kronologi target

Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda memiliki target 100 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

- Kerjasama yang baik antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada anak usia dini;
- 2. Penyampaian materi sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami oleh anak usia dini;
- 3. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda antara lain:

- 1. Kuarangya kesadaran orang tua, guru maupun masyarakat akan penting pengetahuan tentang pentingnya pengetahuan keselamatan transportasi sejak anak masih usia dini;
- 2. Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara berkala;
- 3. Kurangnya

Realisasi kinerja

Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat kegiatan Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda akan dilaksanakan pada bulan September 2025.

Realisasi Kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda Tahun 2025 Triwulan III terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Realisasi Kinerja

= Jumlah kumulatif Anak Usia Dini yang mendapat sosialisasi LLAJ

Realisasi Kinerja = 0

Capaian kinerja

Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda adalah 0 orang

Capaian Kinerja =
$$\frac{\text{Jumlah Anak Usia Dini yang Tersosialisasi}}{\text{Target Anak Usia Dini Yang Tersosialisasi}}$$

Capaian Kinerja =
$$\frac{0}{100}$$
 X $100 = 0$ %

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja untuk Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda yakni 0%.

Pagu realisasi capaian anggaran

Adapun anggaran terkait Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda total Pagu yaitu Rp. 107.143.000 namun pelaksanaan kegiatan masih menunggu hasil efisiensi anggaran apakah kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - Melakukan sosialisasi tentang keselamatan transportasi bagi anak usia dini dengan materi yang menarik dan mudah dipahami anak-anak;
 - Melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait blokir anggaran kegiatan apakah ada kemungkinan untuk pembukaan blokir anggaran;
 - 3. Melakukan sosialisa melalui media sosial maupun media cetak seperti spanduk, baliho dan lain-lain.

II. 3. 8 SK 4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

Sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yaitu:

- 1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat
- 2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat
- 3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan
- 4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat
- 5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan
- 6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
- 7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen
- 8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)
- 9. IKK 4.9 Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- 10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

Adapun penjelasan terkait IKK diatas adalah sebagai berikut:

1. IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat

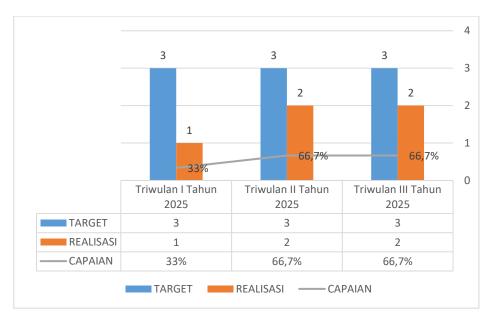
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Kegiatan Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mencakup perumusan kebijakan, penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran di bidang transportasi darat. Ini termasuk perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana transportasi darat, serta sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) pad Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat terdiri dalam 3 kegitan yaitu:

- 1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan;
- 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif;
- 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 66,7%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 14 Grafik Capaian IKK Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

Kronologi Target

Target kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 3 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

- Kerjasama yang baik antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan pihak pemerintah Daerah terkait kebutuhan pemerintah daerah dan ketersediaan lahan untuk pembangunan;
- 2. Data dukung yang terpenuhi untuk setiap usulan kegiatan pembanguanan;
- 3. Sumber daya manusia yang kompeten dibidang perencanaan.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

- 1. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan perencanaan;
- 2. Kondisi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang masih sering terjadi komprik;
- 3. Kurangnya data dukung dari pemerintah daerah terkait permintaan pembangunan fasilitas transportasi Darat.
- Realisasi kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.1 =
Jumlah Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Realisasi Kinerja IKK4.1 = 2

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 2 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

= Realisasi Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Target Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat x100%

Capaian Kinerja =
$$\frac{2}{3}$$
 x100 = 66,7%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yakni 66,7%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran terkait Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 500.672.425 atau sebesar 26,56 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - Selalu melakukan koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah daerah terkait pembangunan demi kemajuan Papua Barat Daya khususnya bidang transportasi;
 - 2. Melengkapi data dukung yang di perlukan terkait perencanaan;
 - 3. Membuat rencana strategis yang jelas dan terukur, yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan transportasi darat nasional.

2. IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mencakup penyusunan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pemantauan dan evaluasi kinerjanya. Ini termasuk penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 1 dokumen jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 1 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 15 Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 85 Tahun 2020 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kronologi Target

Target Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 1 dokumen yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

- 1. Perencanaan kinerja yang baik sehingga tidak mengalami kesulitan dalam peleksanaannya;
- 2. Sumber daya manusia yang kompeten dibidang Kinerja;
- 3. Tersediaanya panduaan yang lengkap dalam penyusunan dokumen SAKIP.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

- 1. Dokumen kegiatan SAKIP di Tahun sebelumnya yang kurang lengkap;
- 2. Adanya pergantian PIC sehingga PIC yang baru perlu penyesuaian;
- 3. Kurangnya kegiatan pengembangan SDM seperti Diklat untuk kegiatan SAKIP.

Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.2 =
Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)

Realisasi Kinerja IKK4.2 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

= Realisasi Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)

Target Jumlah Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) x100%

Capaian Kinerja =
$$\frac{1}{1}$$
 x100 = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 500.672.425 atau sebesar 26,56 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- 1. Membuat perencanaan yang matang dan dapat dicapai sehingga capaian kinerja dapat memperoleh hasil yang baik;
- 2. Meningkatkan kemampuan sember daya manusia melalui kegiatan Diklat maupun mimtek terkait kegiatan SAKIP;
- 3. Melakukan digitalisasi arsip untuk dokumen kegiatan SAKIP agar dokumen dapat tersimpan dengan baik.

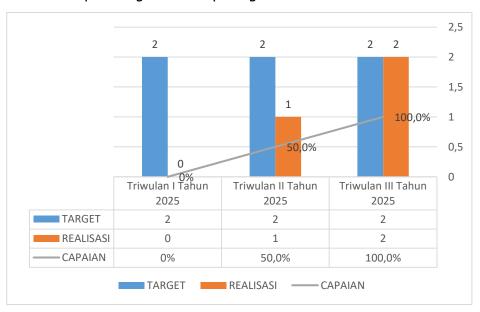
3. IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan mencakup penilaian dan peningkatan tingkat kematangan SPIP di lingkungan kementerian. Ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terdiri atas dua kegiatan yaitu penyusunan SPIP dan penyusunan Dokumen Manajeman Resiko (MR).

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan sebanyak 2 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 16 Grafik Capaian IKK Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarka PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan Penerapan Manajemen Risiko memenuhi prinsip yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi melalui:

- a. prinsip terintegrasi;
- b. prinsip terstruktur dan komprehensif;
- c. prinsip disesuaikan;
- d. prinsip inklusif;
- e. prinsip dinamis;
- f. prinsip ketersediaan informasi terbaik;
- g. prinsip faktor manusia dan budaya;
- h. prinsip perbaikan berkelanjutan.

Kronologi Target

Target kegiatan Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan sebanyak 2 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan antara lain:

- Identifikasi dan penilaian risiko yang komprehensif sangat penting untuk mengetahui potensi masalah dan kelemahan dalam organisasi;
- 2. Dukungan penuh dan komitmen dari pimpinan instansi pemerintah;
- 3. Penerapan kegiatan pengendalian yang efektif, seperti prosedur operasional standar (SOP), otorisasi, verifikasi, dan rekonsiliasi, akan membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan antara lain:

- 1. Keterbatasan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung dapat menjadi kendala dalam penerapan SPIP
- 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten juga dapat menghambat efektivitas SPIP

- 3. Kegagalan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko yang dihadapi organisasi
- Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.3 = Jumlah Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan

Realisasi Kinerja IKK4.3 = 2

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan sebanyak 2 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 2 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

Realisasi Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan Target Kegiatan terkait Maturitas SPIP di Kementerian Perhubungan

Capaian Kinerja = $\frac{2}{2}$ x100 = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan yakni 100%.

 Pagu realisasi capaian keuangan Adapun anggaran Kegiatan terkait Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kementerian Perhubungan Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 500.672.425 sebesar 26,56 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan

adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang SPIP seperti mengikuti diklat, bimtek dan lain-lain;
 - 2. Meningkatkan kualitas dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko yang dihadapi organisasi;
 - 3. Melengkapi data dukung yang sesuai dan melakukan digitalisasi sehingga ketika terjadi perubahan PIC kegiatan SPIP dan MR dokumen yang di perlukan masih tersimpan.

4. IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai target-target pembangunan transportasi darat yang telah ditetapkan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 1 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 17 Grafik Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan PM 6 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Balai pada pasal 9 bahwa Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, serta pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kronologi Target

Target kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 1 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

• Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

- 1. Perencanaan yang detail dan sesuai dengan kebutuhan serta target yang ingin dicapai akan menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan anggaran yang efektif;
- 2. Rencana Penarikan Dana (RPD) harus dikelola secara dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi lapangan;

3. Pemantauan dan pelaporan capaian output harus dilakukan secara rutin dan valid untuk memastikan kesesuaian dengan target yang ditetapkan.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan terkait Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang masih terblokir;
- 2. Perencanaan anggaran yang tidak matang, tidak realistis, atau tidak sesuai dengan kebutuhan dapat menyebabkan berbagai masalah selama pelaksanaa;
- Ketidaksesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan Perubahan rencana kegiatan atau kebijakan, atau ketidakmampuan untuk mengantisipasi perubahan kondisi lapangan,
- Realisasi kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.4 = Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Hubdat

Realisasi Kinerja IKK4.4 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 1 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 1 kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

= Realisasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Hubdat
Target Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Hubdat

Capaian Kinerja =
$$\frac{1}{1}$$
 x100 = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 500.672.425 atau sebesar 26,56 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - 1. Membuat Perencanaan yang detail dan sesuai dengan kebutuhan serta target yang ingin dicapai;
 - 2. Melakukan koordinasi dengan bagian anggaran terkait urgensitas kegiatan yang perlu anggaran pelaksanaan;
 - 3. Melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin.

5. IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Tingkat lanjut rekomendasi audit adalah tindakan yang diambil oleh entitas yang diaudit untuk menanggapi saran atau rekomendasi yang diberikan oleh auditor dalam laporan hasil pemeriksaan. Ini adalah bagian penting dari proses audit untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi audit diatasi dan perbaikan yang diperlukan dilakukan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 1 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 18 Grafik Capaian IKK Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada pasal 20 dikatakan bahwa:

- 1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 3. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- 4. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang .
- 6. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Kronologi Target

Target Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen yang diperoleh dari POK Balai Pengelola

Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan antara lain:

- Dukungan dan komitmen dari manajemen puncak sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi audit ditindaklanjuti dengan baik
- 2. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik akan memastikan bahwa tindakan korektif yang diambil berdasarkan rekomendasi audit benar-benar efektif dan memberikan perbaikan yang berkelanjutan
- 3. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara auditor dan auditee akan memastikan bahwa rekomendasi audit dipahami dengan baik dan ditindaklanjuti dengan tepat.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan antara lain:

- Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait (auditor, auditee, pihak lain yang terlibat) dapat menghambat proses tindak lanju
- 2. Temuan audit berulang, ini bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah mendasar yang belum teratasi, dan tindak lanjut yang efektif belum dilakukan
- 3. Kurangnya Komitmen Organisasi Jika tidak ada komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran organisasi untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka tindak lanjut akan sulit dilakukan
- Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.5 = Jumlah Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan

Realisasi Kinerja IKK4.5 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi

audit/Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kineria

= Realisasi dokumen Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan x100% Target dokumen Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan

Capaian Kinerja = $\frac{1}{1}$ x100 = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan yakni 100%.

- Pagu realisasi capaian keuangan
 Adapun anggaran Kegiatan Tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 500.672.425 atau sebesar 26,56 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - 1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti kontraktor dan pejabat sebelumnya yang kegiatannya menjadi temuan pada saat audit/pemeriksaan;
 - Segerah menindak lanjuti temuaan audit/pemeriksaan agar tidak menjadi temuan berulang;
 - 3. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik untuk kegiatan yang saat ini sedang berjalan agar tidak terdapat kesalahan sehingga tidak menjadi temuan pada saat audit/pemeriksaan.

6. IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pengelolaan aset (skor) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, berfokus pada pengelolaan barang milik negara, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terdiri atas 2 kegiatan yaitu Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset dan Kegiatan Penatausahaan BMN. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 6 dokumen jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 2 dokumen maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 19 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal.

Kronologi Target

Target Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 6 dokumen yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

- 1. SDM yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip pengelolaan aset sangat krusial;
- 2. Pengelompokan aset berdasarkan atributnya memudahkan pengelolaan dan pencarian informasi;
- 3. Perencanaan yang baik mencakup identifikasi aset, perencanaan kebutuhan, akuisisi, penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan aset.

• Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

- Pengadaan aset yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan aset yang tidak terpakai
- 2. Kurangnya data yang akurat tentang aset dapat menyulitkan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat terkait pengelolaan aset
- 3. Aset yang tidak dipelihara secara teratur akan mengalami penurunan kualitas dan fungsi lebih cepat, yang dapat menyebabkan kerusakan, gangguan operasional, dan biaya perbaikan yang lebih tinggi.

Realisasi kinerja Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.6 = Jumlah Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat

Realisasi Kinerja IKK4.6 = 3

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 2 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 6 dokumen maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja

= Realisasi dokumen Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat
Target dokumen Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat x100%

Capaian Kinerja =
$$\frac{3}{6}$$
 x100 = 50%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat yakni 50%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 500.672.425 atau sebesar 26,56 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - 1. Melakukan inventarisasi asset secara berkala;

- 2. Melangkapi data dukung dokumen pada saat pembangunan atau pengadaan asset sehingga pencatatannya tidak mengalami kesulitas;
- 3. Melkukan penata usahaan atau penghapusan untuk asset-aset yang tidak dapat di fungsikan lagi.

7. IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan HUMAS dan Kegitan PPID. Kegiatan Humas pada Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi berbagai upaya untuk membangun citra positif dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Beberapa kegiatan utamanya adalah menyampaikan informasi, mengelola reputasi, membangun kepercayaan publik terhadap BPTD. Humas BPTD bertugas menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPTD kepada masyarakat melalui berbagai media seperti website, media sosial, siaran pers, dan publikasi lainnya. Kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Balai Pengelola Transportasi Darat berfokus pada pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi terkait transportasi darat. Tugas utama PPID BPTD adalah mengelola informasi, menyampaikannya secara efisien, melakukan pemutakhiran digital, dan menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan. PPID BPTD bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengelola seluruh informasi yang berkaitan dengan transportasi darat yang menjadi kewenangan BPTD.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 3 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 20 Grafik Capaian IKK Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kronologi Target

Target Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen sebanyak 3 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen antara lain:

 Penetapan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur untuk memastikan informasi yang diberikan efektif, efisien, dan akuntabel;

- Kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi, baik melalui website, media sosial, maupun layanan tatap muka;
- 3. Dukungan penuh dari pimpinan instansi sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Humas dan PPID.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen antara lain:

- Kurangnya perencanaan yang matang. Kegiatan humas yang tidak direncanakan dengan baik cenderung tidak efektif. Perencanaan yang matang meliputi identifikasi target audiens, tujuan yang ingin dicapai, pesan yang akan disampaikan, media yang digunakan, serta anggaran dan waktu pelaksanaan;
- Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran. Kegiatan kehumasan yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang memadai. Keterbatasan sumber daya ini dapat menghambat pelaksanaan programprogram kehumasan, seperti publikasi, acara, atau kampanye;
- 3. Kurangnya keterbukaan informasi PPID harus memastikan bahwa informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Kurangnya keterbukaan informasi dapat menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- Realisasi kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.7 =

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen

.......

Realisasi Kinerja IKK4.7 = 3

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja terhadap Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen sebanyak 3 Kegiatan perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja =
$$rac{ ext{Realisasi}}{ ext{Target}}$$
 x 100%

Capaian Kinerja =
$$\frac{3}{3}$$
 x100 = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen yakni 100%.

- Pagu realisasi capaian keuangan
- Adapun anggaran Kegiatan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.885.240.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 500.672.425 atau sebesar 26,56% dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pada bagian pengelolaan bidang ketatausahaan.
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kepuasan pelayanan informasi publik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan;
 - 2. Membangun komunikasi dua arah antara instansi dengan masyarakat, bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - 3. Memberikan pelatihan secara berkala kepada staf PPID untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan informasi publik.

8. IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Digitalisasi arsip adalah proses mengubah arsip dari format fisik (seperti kertas) menjadi format digital. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan informasi, meningkatkan aksesibilitas, dan

mengoptimalkan pengelolaan dokumen. Proses ini melibatkan pemindaian (scanning) dokumen, penyimpanan dalam format digital (misalnya PDF, TIFF), dan pengelolaan dengan sistem kearsipan digital.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebanyak 1 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 1 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 21 Grafik Capaian IKK kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan SE Nomor SE-PHB 4 TAHUN 2024 Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman Penerapan Aplikasi SRIKANDI yang digunakan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Surat Edaran ini bertujuan untuk rneningkatkan kualitas dan akuntabilitas bangsa serta rnenjadi memori kolektif kearsipan pengelolaan informasi berbasis digital dapat terekam dengan baik serta memudahkan koordinasi antar unit kerja di Kementerian Perhubungan.

Kronologi Target

Target Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebanyak 1 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) antara lain:

- 1. Ketersediaan teknologi yang memadai seperti perangkat komputar, jaringan internet dan lain-lain;
- Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM terkait digitalisasi arsip sangat penting untuk memastikan keberhasilan kegiatan;
- 3. Perencanaan yang matang Meliputi identifikasi arsip yang akan didigitalkan, tujuan digitalisasi, metode digitalisasi, serta rencana jangka panjang untuk pengelolaan arsip digital.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) antara lain:

- 1. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, dapat menjadi penghambat utama;
- 2. Seringkali, digitalisasi arsip justru menambah kerumitan dalam proses kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang sistem baru, atau penerapan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 3. Potensi serangan siber, peretasan, atau kehilangan data dapat mengancam keberlangsungan arsip digital.
- Realisasi kinerja

Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.8 = Kegiatan Digitalisasi Arsip (Sl	
	,

Realisasi Kinerja IKK4.8 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) sebanyak 1

kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja =
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$
 x100%

Capaian Kinerja =
$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) yakni 100%.

Pagu realisasi capaian keuangan

Adapun anggaran Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 3.016.642.000 realisasi anggaran hingga akhir September 2025 sebesar Rp. 1.265.121.746 atau sebesar 34,70 % dari total anggaran. Anggaran yang digunakan adalah Kegiatan layanan perkantoran.

- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - 1. Memberikan Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital;
 - 2. Buat rencana digitalisasi yang komprehensif, melibatkan semua pihak terkait, dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang;
 - 3. Tingkatkan pemahaman dan kesadaran tentang manfaat digitalisasi di seluruh organisas.

9. IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

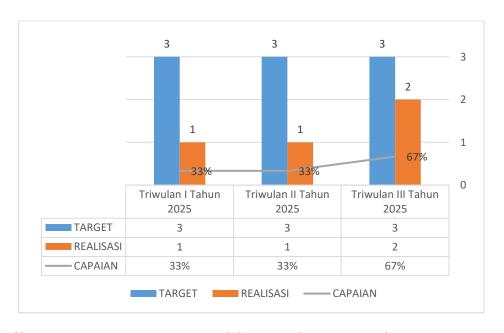
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah serangkaian proses yang mengatur pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga serah terima, untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Pengelolaan ini melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, persiapan,

pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengawasan, dar penyerahan hasil pengadaan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 2 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 67%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 22 Grafik Capaian IKK Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Kronologi Target

Target kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 3 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

- 1. Kebutuhan barang dan jasa teridentifikasi dengan baik, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi;
- Penyedia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan, termasuk rekam jejak yang baik;
- 3. Penggunaan system pengawasan yang efektif akan memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:

- 1. Kesalahan dalam memahami atau mengikuti aturan teknis atau administrasi dapat menyebabkan kegagalan tender atau pengulangan proses pengadaan;
- 2. Anggaran yang tidak mencukupi atau tidak dialokasikan dengan tepat dapat menghambat proses pengadaan dan mengakibatkan penundaan atau pengurangan kualitas barang/jasa;
- 3. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pengguna anggaran, pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa, dapat menyebabkan ketidaksesuaian, keterlambatan, dan bahkan kegagalan pengadaan.
- Realisasi kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.9 =

Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Realisasi Kinerja IKK4.9 = 1

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

sebanyak 2 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja =
$$rac{ ext{Realisasi}}{ ext{Target}}$$
 x 100%

Capaian Kinerja =
$$\frac{2}{3}$$
 x100 = 67%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yakni 67%.

- Pagu realisasi capaian keuangan
 Adapun anggaran Kegiatan Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 272.720.000,- belum terdapat realisasi anggaran hingga akhir September 2025 karna anggaran masih terblokir.
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - 1. Melakukan monitoring dan inventarisasi kebutuhan sebelum melakukan pengusulan pengadaan barang dan jasa;
 - 2. Melakukan koordinasi dengan bagian anggaran terkait pembukaan blokir anggaran agar kagiatan dapat terlaksana;
 - 3. Meningkatkan kompetensi SDM dibidang pengelolaan barang dan jasa.

10. IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja mencakup berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa unit kerja memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja dapat berupa Memberikan pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan

pengetahuan spesifik yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu, seperti pelatihan penggunaan aplikasi, pelatihan bahasa asing, atau pelatihan teknis lainnya. Mengembangkan keterampilan nonteknis seperti komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, manajemen waktu, dan pemecahan masalah.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target kinerja Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja sebanyak 3 kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebanyak 0 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian digambarkan pada grafik di bawah ini:



Gambar II. 23 Grafik Capaian IKK Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja

a.3. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 37 Tahun 2020 bahwa Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis SDM Aparatur diikutsertakan pada pelatihan. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. Pelatihan yang diberikan kepada Analis SDM Aparatur dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur. Selain pelatihan Analis SDM Aparatur dapat mengembangkan kompetensinya

melalui kompetensi lainnya seperti seminar, lokakarya, konferensi, dan studi banding.

Kronologi Target

Target kinerja Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja sebanyak 3 kegiatan yang diperoleh dari POK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Faktor keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja antara lain:

- Program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif;
- Komunikasi yang efektif dan terbuka akan memastikan bahwa semua anggota unit kerja memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, tugas, dan harapan;
- 3. Memperhatikan kesejahteraan karyawan, seperti kesehatan fisik dan mental, akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.

Faktor kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja antara lain:

- 1. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM. Ini bisa termasuk kurangnya dana untuk pelatihan, biaya operasional, atau fasilitas yang dibutuhkan
- 2. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan yang tidak memadai dapat menjadi penghambat dalam proses pengembangan. Jika karyawan tidak memiliki dasar yang cukup, program pelatihan mungkin tidak akan efektif.
- Strategi pengembangan SDM yang tidak jelas atau tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan program menjadi tidak efektif
- Realisasi kinerja
 Perhitungan realisasi kinerja

Realisasi Kinerja IKK4.10

= Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja

Capaian kinerja

Berdasarkan perhitungan realisasi kinerja, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja sebanyak 0 kegiatan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Kegiatan maka perhitungan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja =
$$rac{ ext{Realisasi}}{ ext{Target}}$$
 x100%

Capaian Kinerja =
$$\frac{0}{3}$$
 x100 = 0%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat diketahui untuk capaian kinerja Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja yakni 0%.

- Pagu realisasi capaian keuangan
 Adapun anggaran Kegiatan Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit kerja Tahun 2025 yaitu senilai Rp. 675.000.000,- belum terdapat realisasi anggaran hingga akhir September 2025 karna anggaran masih terblokir.
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:
 - Memberikan Program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan agar meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan;
 - 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja secara rutin;
 - 3. Melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan SDM.

II. 3. 9 Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar Rp.92.243.346.000,- dengan rincian per Sumber Dana sebagai berikut:

Tabel II. 4 Rincian Pagu Awal per Sumber Dana

Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%
SBSN	Rp.	_	0%
PNBP	Rp.	17.642.840.000	19,13%
RM	Rp.	74.600.506.000	80,87%

Tabel II.5 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Belanja Pegawai	Rp.	-	-
Belanja Barang	Rp.	79.720.664.000	86,42%
Belanja Modal	Rp.	12.522.682.000	13,58%
Total	Rp.	92.243.346.000	100,00%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 akibat adanya Revisi DIPA sampai saat ini sudah terdapat 11 kali revisi anggaran sehingga total anggaran DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 adalah sebesar **Rp.93.562.994.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.6 Rincian per Sumber Dana Pagu TA. 2025

RM	Rp.	75.820.154.000	81,04%
PNBP	Rp.	17.747.840.000	18,96%
SBSN	Rp.	-	0%
Total	Rp.	93.562.994.000	100,00%

Namun hingga saat ini Pagu pada DIPA BPTD Kelas II Papua Barat sekitas 32% anggaran masih diblokir karena kebijakan efisiensi anggaran.

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 93.562.994.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut:

Tabel II. 7 Rincian Pagu per Jenis Belanja

Belanja Pegawai	Rp.	-	-
Belanja Barang	Rp.	80.920.876.000	86,49%
Belanja Modal	Rp.	12.642.118.000	13,51%
Total	Rp.	93.562.994.000	100,00%

- c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran Pengurangan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai surat pengesahan Revisi Anggaran sebagai Berikut:
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 02 Desember 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (DIPA Awal);
 - 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-1);
 - 3) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 22 Januari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-2);
 - 4) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 8 Februari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-3);
 - 5) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 22 Februari 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-4);
 - 6) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 24 Maret 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-5).
 - 7) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 11 April 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-6).
 - 8) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 2 Juli 2025 perihal

- Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-7).
- 9) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 4 Juli 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-8).
- 10) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-9).
- 11) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 20 Agustus 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-10).
- 12) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor SP DIPA-022.03.2.403867/2025 Tanggal 24 September 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat TA. 2025 (Revisi ke-11).

2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

a. Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025

Sampai pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mengalami beberapa kali revisi POK namun belum ada perubahan pada nilai Pagu. Berikut adalah rincian revisi anggaran per sumber dana.

Tabel II. 8 Rincian Revisi Anggaran Tahun 2025 per Sumber Dana

		JUMLAH		
	RM	PNBP	SBSN	JUMLAN
PAGU AWAL	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-1	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-2	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-3	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-4	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-5	74.600.506.000	17.642.840.000	1	92.243.346.000
REVISI KE-6	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-7	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-8	74.600.506.000	17.642.840.000	-	92.243.346.000
REVISI KE-9	73.396.996.000	17.642.840.000	-	91.039.836.000

REVISI KE-10	73.396.996.000	17.642.840.000	-	91.039.836.000
REVISI KE-11	75.820.154.000	17.742.840.000	-	93.562.994.000

 b. Rincian Realokasi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 Adapun rincian realokasi anggaran per jenis belanja dijelaskan pada tabel di bawah ini. Sampai dengan Triwulan III belum terdapat perubahan nominal per sumber dana dan per jenis belanja TA 2025.

Tabel II. 9 Rincian Revisi Anggaran Tahun 2025 Per Jenis Belanja

		JENIS BELANJA		
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
PAGU AWAL	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-1	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-2	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-3	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-4	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-5	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-6	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-7	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-8	-	79.720.664.000	12.522.682.000	92.243.346.000
REVISI KE-9	-	78.517.154.000	12.522.682.000	91.039.836.000
REVISI KE-10	-	78.517.154.000	12.522.682.000	91.039.836.000
REVISI KE-11	-	80.920.876.000	12.642.118.000	93.562.994.000

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja TA 2025
Adapun rincian realokasi anggaran per sumber dan dan per jenis belanja pada Triwulan III Tahun 2025 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 10 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja TA 2025

ALOKASI	ALOKASI PAGU AWAL		PAGU AKHIR PER TRIWULAN III
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	79.720.664.000	1	80.920.876.000
· RM	62.077.824.000	1.098.212.000	63.176.036.000
· PNBP	17.642.840.000	100.000.000	17.742.840.000
Belanja Modal	12.522.682.000		12.642.118.000
· RM	12.522.682.000	119.436.000	12.642.118.000
· PNBP	-	ı	-
· SBSN	-	-	-
TOTAL	92.243.346.000	1.317.648.000	93.562.994.000

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan TA 2025 Adapun rincian realokasi anggaran per sumber dan dan per jenis belanja dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 11 Rincian Realokasi per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan T.A 2025

	NOMENKLATUR		PAGU PER	TRIWUL	TRIWULAN I		TRIWULAN II		PAGU PER	TRIWULAN III	
KODE	PROGRAM	PAGU AWAL	TRIWULAN I	REALIASI	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALIASI	%	TRIWULAN III	REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	81.381.240.000	81.381.240.000	4.242.427.524	5,21%	81.381.240.000	16.822.507.047	20,67%	83.275.110.000	25.699.709.563	30,86%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	60.113.993.000	60.113.993.000	2.073.883.649	3,45%	60.113.993.000	12.548.269.903	20,87%	58.807.863.000	18.375.466.522	31,25%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	17.352.602.000	17.352.602.000	1.800.162.875	10,37%	17.352.602.000	3.604.730.644	20,77%	19.452.602.000	6.456.273.616	33,19%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.914.645.000	3.914.645.000	368.081.000	9,40%	3.914.645.000	669.506.500	17,10%	5.014.645.000	867.969.425	17,31%
022.03.W A	Program Dukungan Manajemen	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%	10.862.106.000	4.440.254.816	40,88%	10.287.884.000	5.646.537.211	54,89%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%	10.862.106.000	4.440.254.816	40,88%	10.287.884.000	5.646.537.211	54,89%

 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024-2025
 Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari Tahun 2024 – 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 12 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I-III Tahun 2025

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi			
NO	ranun	Rp.	Rp.	Rp.	%		
1	TRIWULAN I	92.243.346.000	92.243.346.000	6.878.382.559	7,46		
2	TRIWULAN II	92.243.346.000	92.243.346.000	21.262.761.863	23,05		
3	TRIWULAN III	93.562.994.000	93.562.994.000	31.346.246.774	33,50		



Gambar II. 24 Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I-III Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap Triwulan, sehingga di ketahui masing-masing dana yang terserap setiap triwulan. Seperti pada Triwulan I Pagu anggaran sebesar Rp. 92.243.346.000,- dan realisasi anggaran sampai akhir Triwulan I adalah sebesar Rp. 6.878.382.559,- atau sebesar 7,46% dan Triwulan II Pagu anggaran sebesar Rp. 92.243.346.000,- dan realisasi anggaran sampai akhir Triwulan II adalah sebesar Rp. 21.262.761.863,- atau sebesar 23,05% dan Triwulan III Pagu anggaran sebesar Rp. 93.562.994.000,- dan realisasi anggaran sampai akhir Triwulan III adalah sebesar Rp. 31.346.246.774,- atau sebesar 33,50%.

II. 3. 10 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025
 Adapun data realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 13 Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

	NOMENKLATUR	PAGU PER		TRIWUL	AN I	PAGU PER	PAGU PEP TRIWULAN II		PAGU PER	TRIWULAN III	
KODE	PROGRAM	PAGU AWAL	TRIWULAN I	REALIASI	%	TRIWULAN II	REALIASI	%	TRIWULAN III	REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	81.381.240.000	81.381.240.000	4.242.427.524	5,21%	81.381.240.000	16.822.507.047	20,67%	83.275.110.000	25.699.709.563	30,86%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	60.113.993.000	60.113.993.000	2.073.883.649	3,45%	60.113.993.000	12.548.269.903	20,87%	58.807.863.000	18.375.466.522	31,25%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	17.352.602.000	17.352.602.000	1.800.162.875	10,37%	17.352.602.000	3.604.730.644	20,77%	19.452.602.000	6.456.273.616	33,19%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	3.914.645.000	3.914.645.000	368.081.000	9,40%	3.914.645.000	669.506.500	17,10%	5.014.645.000	867.969.425	17,31%
022.03.W A	Program Dukungan Manajemen	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%	10.862.106.000	4.440.254.816	40,88%	10.287.884.000	5.646.537.211	54,89%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	10.862.106.000	10.862.106.000	2.636.255.035	24,27%	10.862.106.000	4.440.254.816	40,88%	10.287.884.000	5.646.537.211	54,89%

2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025 Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 14 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU PER			PAGU PER	REALISASI TRIWULAN 1		PAGU PER	REALISASI TRIWULAN III	
NO	JENIS BELANJA	TRIWULAN I	Rp	%	TRIWULAN II	Rp	%	TRIWULAN III	Rp	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	79.720.664.000	6.851.536.559	8,59	79.720.664.000	20.900.962.044	26,22	80.920.876.000	28.959.191.089	35,79
3	Belanja Modal	12.522.682.000	26.846.000	0,21	12.522.682.000	361.799.819	2,89	12.642.118.000	2.387.055.685	18,88
	Total	92.243.346.000	6.878.382.559	7,46	92.243.346.000	21.262.761.863	23,05	93.562.994.000	31.346.246.774	33,50

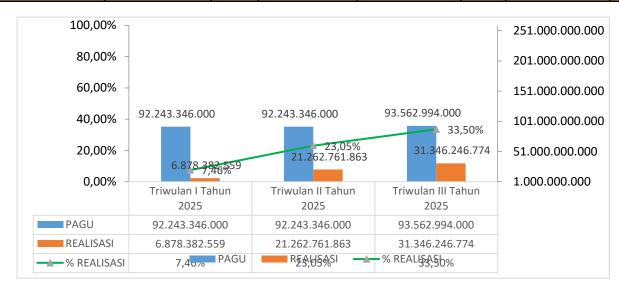
Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja pada Triwulan III Tahun 2025 untuk belanja barang sebesar Rp. 28.959.191.089 atau sebesar 35,79% dari total pagu Rp. 80.920.876.000 dan untuk belanja modal realisasi sebesar Rp. 2.387.055.685 atau sebesar 18,88 % dari total pagu Rp. 12.642.118.000.

3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun Anggaran 2025 yang sudah di analisis per Triwulan III untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 15 Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI TW III	REALISASI TW III	
		TW I	Rp	%	TW II	Rp	%		Rp	%
1	Rupiah Murni	74.600.506.000	6.878.382.559	9,22	74.600.506.000	21.262.761.863	28,50	75.820.154.000	31.292.607.774	41,27
2	PNBP	17.642.840.000	-	-	17.642.840.000	-	-	17.742.840.000	53.639.000	0,003
3	SBSN	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	92.243.346.000	6.878.382.559	7,46	92.243.346.000	21.262.761.863	23,05	93.562.994.000	31.346.246.774	33,50



Gambar II. 25 Grafik Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 16 Rincian Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
	521125 522 11 1571	Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	80.920.876.000	28.959.191.089	51.961.684.911
3	Belanja Modal	12.642.118.000	2.387.055.685	10.255.062.315
тот	AL	93.562.994.000	31.346.246.774	62.216.747.226

Tabel II. 17 Rincian Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
NO	JENIS KUPIAN	Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	75.820.154.000	31.292.607.774	44.527.546.226
2	PNBP	17.742.840.000	53.639.000	17.689.201.000
3	SBSN			
тот	AL	93.562.994.000	31.346.246.774	62.216.747.226

Tabel II. 18 Rincian Kegiatan Terblokir Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SISA PAGU
1	Program Infrastruktur Konektivitas	27.864.995.000
2	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	17.000.000.000
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	7.968.377.000
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	2.896.618.000
5	Program Dukungan Manajemen	1.976.687.000
6	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	1.976.687.000
	TOTAL	29.841.682.000

II. 3. 11 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan III Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 19 Rincian Efisiensi Anggaran

				TRIWULAN I		1	TRIWULAN II		TR	RIWULAN III	
No		SASARAN PROGRAM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)
1	SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	100	32,77	67,23	100	32,77	67,23	100	59,37	40,63
2	SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	50	32,74	17,26	50	32,74	17,26	50	25,21	24,79
3	SK8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	50	18,65	31,35	50	18,65	31,35	50	28,23	21,77
4	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	8,32	24,75	-16,43	28,75	24,75	4	60	17,28	42,73
5	SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	94,2	65	29,2	94,2	65	29,2	99	66,50	32,5
7	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SK4	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	50	19,4	30,6	68,36	19,4	48,96	78,4	22,06	56,34
		Rata-rata	44,07%	24,16%	19,90%	48,91	24,16	24,75	61,87	27,33	27,35

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat, membutuhkan SDM yang mencukupi sehingga dapat menunjang optimalisasi pelayanan transportasi darat di kantor induk maupun di kantor satuan pelayanan.

Tabel II. 20 Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Jumlah kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	250	148	59,2%	30,796	33,67%	146,63%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 30,796, dengan realisasi kinerja sebesar 33,67% menunjukkan capaian SDM sebesar 59,2% dengan realisasi sebanyak 148 dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 250, Dimana realisasi tersebut terdiri dari 67 orang PNS, 43 Orang PPPK dan 38 tenaga Outsourcing.

II. 3. 12 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih dalam realisasi daya serap anggaran antara lain:

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran;
- 2. Anggaran untuk beberapa kegiatan masih di blokir sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan;
- 3. Kegiatan kontraktual seperti Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.
- 4. Kondisi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya di beberapa daerah yang masih sering terjadi konflik;
- 5. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- 6. System perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran sehingga masih banyak melakukan revisi anggaran.
- 7. Dalam kegiatan pembangunan, faktor cuaca/faktor alam yang tidak menentu menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaannya.







BAB III

PENUTUP

BAB III

PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat serta Pengelolahan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa dari 23 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang lebih besar atau sama dengan 100% (0%≤IKK<100%) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kurang dari 100% (0%≤IK<100%). Adapun rincian untuk setiap IKK pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan terealisasi sebanyak
 Trayek (target 23 Trayek) tercapai 100%;
- 2. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas terealisasi sebanyak 0 unit (target 1 Unit) tercapai 0%;
- 3. Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP terealisasi sebanyak 5 Trayek (target 5 Trayek) tercapai 100%;
- 4. Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM terealisasi sebanyak 0 unit (target 2 Unit) tercapai 0%;
- 5. Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM terealisasi sebanyak 7 Lokasi (target 7 Lokasi) tercapai 100%;
- 6. Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 50%;
- 7. Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 5 kegiatan) tercapai 40%;
- 8. Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 4 kegiatan) tercapai 50%;
- 9. Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
- 10. Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 6 kegiatan) tercapai 0%;

- 11. Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis terealisasi sebanyak 3.593 Unit (target 3.623 unit) tercapai 99%;
- 12. Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 Orang (target 400 Orang) tercapai 0%;
- 13. Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda terealisasi sebanyak 0 Orang (target 100 Orang) tercapai 0%;
- 14. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 67%;
- Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 1 dokumen (target 1 dokumen) tercapai 100%;
- 16. Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 2 kegiatan) tercapai 100%;
- 17. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
- 18. Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan terealisasi sebanyak 1 dokumen (target 1 dokumen) tercapai 100%;
- 19. Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 3 dokumen (target 6 dokumen) tercapai 50%;
- 20. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebanyak 3 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 100%;
- 21. Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor) terealisasi sebanyak 1 kegiatan (target 1 kegiatan) tercapai 100%;
- 22. Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa terealisasi sebanyak 2 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 67%;
- 23. Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja terealisasi sebanyak 0 kegiatan (target 3 kegiatan) tercapai 0%;

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Berdasarkan hasil evaluasi diperlukan rekomendasi dalam upaya perbaikan disertai unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan rekomendasi yang disusun. Berikut hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penganggung jawab :

Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

	SASARAN			TARGET		TRIWULAN I	I			PENANGGUNG
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DALAM PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	JAWAB
1.	SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	23	23	23	100%	Tercapai	Meningkatkan Koordiansi dengan pihak GM Damri cabang agar target tahun-tahun berikutnya dapat tercapai dengan baik. Mengoptimalkan revisi anggaran terkait angkutan perintis jalan agar alokasi anggaran setiap cabang Damri sesuai dengan kebutuhan	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan	IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	1	0	0		nelakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	
	penyeberangan	IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	5	5	100%	Tercapai	 Meningkatkan koordinasi dengan pihak ASDP dan pihak lainnya agar kegiatan dapat berjalan dengan baik; Mengoftimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran yang tersediah menngingat saat ini anggaran mengalami efisiensi. 	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

	SASARAN			TARGET		TRIWULAN I	I			PENANGGUNG
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DALAM PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	JAWAB
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	2	2	0	0%	Tidak Tercapai	melakukan persiapan kegiatan seperti inventaris jedung terminal bagian mana saja yang akan dilakukan	
	·	IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	7	7	100%	Tercapai	Menambah dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
									Mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan anggaran yang tersediah.	
									terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait baik di instasi pusat maupun di tingkat daerah	
4.	SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	6	3	50%	Tidak Tercapai	selanjutnya akan dilakukan penindakan pada kendaraan odol di provinsi papua Barat Daya pada Bulan Agustus 2025	Sarana dan Angkutan Jalan,
										Penyeberangan, dan Pengawasan

	SASARAN			TARGET		TRIWULAN I	Ī			elakukan dan secara dapat dapat dan Pengawasan syarakat Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Penyeberangan, dan Pengawasan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan dersiapan dengan dan Penyeberangan, Penyeberangan, Penyeberangan, Penyeberangan,
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DALAM PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	
		IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	5	2	40%	Tidak Tercapai	koordinasi dan pemantauan secara	Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	4	2	50%	Tidak Tercapai	nelakukan pengawasan erhadap Faskes yang elah terpasang	Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan,
		IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	1	1	100%	Tercapai	Melakukan persiapan pengawasan pemeliharaan dan berkoordinasi dengan pihak pelaksana atau kontraktor	Jalan, Sungai, Danau,
5.	SK10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	6	0	0%	Tidak Tercapai	Melakukan sosialisasi nengenai peraturan kalibrasi dan akreditasi agar beberapa kabupaten yang berlum nemiliki alat uji terdorong Intuk melakukan pengadaan alat uji.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
6.	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3.623	3.623	3.593	99%	Tidak tercapai	saat ini untuk pengadaan paku jalan masih dalam ahap pemeliharaan hasil bekerjaan sedangkan kegiatan pengadaan dan pemasangan guadrail nasih dan sedang perjalan.	Jalan, Sungai,
7	SK12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan	IKK12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang	Orang	400	400	0	0%	Tidak tercapai	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan	Angkutan Jalan,

	SASARAN			TARGET		TRIWULAN I	I			PENANGGUNG
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DALAM PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	JAWAB
	berkeselamatan	berbeda							plokir anggaran	Penyeberangan
		IKK12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	100	0	0%	Tidak tercapai	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.	SK4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	2	67%	Tidak tercapai	melakukan koordinasi yang baik dengan pihak nternal BPTD Kelas II Papua Brat maupun pemerintah pusa	
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	1	1	100%	Tercapai	saat ini sedang dilaksanakan persiapan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	2	2	100%	Tercapai	saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lembar kerja evaluasi oleh Inspektorat lenderal	
		IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	100%	Tercapai	saat ini tingkat benyerapan anggaran masih renda karena terdapan anggaran yang di blokit sehingga	Usaha
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	100%	Tercapai	telah dibuat surat tindak lanjut atas temuaan itjen	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6	6	3	50%	Tidak tercapai	nelakukan penata Isahaan Aset BMN yang belum tercatat dengan	

	SASARAN			TARGET		TRIWULAN I	I			PENANGGUNG
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DALAM PK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	EVALUASI	TINDAK LANJUT	JAWAB
									paik	
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	100%	Tercapai	saat ini selalu dilakukan sosialisasi terkait keselamat baik melalui nedia online maupun nedia cetak	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	1	1	100%	Tercapai	melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan perkantoran namun tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Usaha
		IKK4.9 Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	3	2	67%	Tidak tercapai	nelakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan plokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	3	0	0%	Tidak tercapai	nelakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan plokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha







LAMPIRAN







RENCANA KINERJA 25 TAHUNA

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat











RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025 UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)		(2)	- Z	(3)	(4)	(5)
1.	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Sorong,1g Desember 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

BALAI PENGE TRANSPORTASI KELAS II PAP

Fely Purwants NIP. 19841217 200912 1 002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Masnah, S.Pd.I.	Pengelola Keuangan	8-1-2025	gh.
2.	Diperiksa	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	8-1-2025	9
3.	Disetujui	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1-1-2025	7
4.	Disetujui	Andreas, S.E, M.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	8-1-2025	X
5.	Disetujui	Herwanto, A.Md.LLAJ., S.IP., M.M.	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	8-1-2025	M
6.	Disetujui	Syaifullah, S.T.	Plt. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	8-1-2025	1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Edy Purwanto

Jabatan

: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

: Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan

: Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

> Ahmad Yani, A.T.D., M.T. NIP. 19650930 199003 1 003

Sorong, Sanuari 2025 Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Papua Barat

Edy Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	S	ASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INI	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1.	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		,antamoda transportasi	IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3.	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
4.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5.	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel		Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN

ANGGARAN

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000
2.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000
3.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000

Sorong, 5 Januari 2025

Disetujui Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

> Ahmad Yani, A.T.D., M.T. NIP. 19650930 199003 1 003

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Papua Barat

Edy Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TAHUN 2025

		INDIKATOR			T					RE	INCANA F	PELAKSA	NAAN						PENANGGUNG
ИО	SASARAN KEGIATAN	KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan- 5	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan- 10	Bulan- 11	Bulan- 12	ANGGARAN (Rp)	JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	8,3	16,6	25,5	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,4	91,7	100	7.742.992.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
	p p k a	IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Subsidi Operasional Perintis angkutan penyeberangan Provinsi Papua Barat	8,3	16,6	25,5	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,4	91,7	100	35.371.001.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberagan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2.516.175.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan pemenuhan SPM Kapal Penyeberangan dan Pelabuhan Penyeberangan		-	1#1	-	*	40	70	100	-			100	2.516.175.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan		30	40	50	60	80	100	(%)		(5.0)	-	3.	12.456.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
		kondisi ideal			Bantuan Teknis Perlengkapan jalan	-	30	40	50	60	80	100	-	-	*	-	80	921,292.000	Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
					Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	-	30	40	50	60	80	100	S=1		181	-	-	1.100.000.000	

			1 - 17 - 17					V-, 1	7 7	RE	ENCANA I	PELAKSA	NAAN	-TIX				ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan- 9	Bulan- 10	Bulan- 11	Bulan- 12		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		107	1.50	1000		60	80	100	-	-	-	-	-	2.068.167.000	
					Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	30	40	50	60	30	100						200 000 000	
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang	Orang	500	Penyelenggaraan pekan keselamatan Nasional	-	-	-	-	-				400				300.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan
		keselamatan transportasi darat			Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD)	100	-	-	-	-	=			100		a	-	107.143.000	Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor		100	-	-		ж	•	7.	-	-	-	-	400.000.000	Seksi Sarana dar Angkutan Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7.5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	3,914,645.000	Seksi Sarana dar Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintar Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasar Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Sub Bagian Tata
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat		90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.5	15	22,5	30	37,5	45	52,	5 60	67,5	75	82,5	90	8,345.931.000	Usaha Sub Bagian Tat Usaha

Sorong, 15 Januari 2025 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Pappa Barat



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf	
1.	Dikonsep	Masnah, S.Pd.I.	Penata Layanan Operasional	16-6-2025	H.	
2.	Diperiksa	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	17 6 -204	Ð	
3.	Disetujui	Raditya Firmansyah Darmawan, S.S.T (TD)., M.T.	Kepala Subbagian Tata Usaha	17 . 6 -2025	8	
4.	Disetujui	Andreas, S.E, M.E.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	17 - 6 - 2025	A	
5.	Disetujui	Herwanto, A.Md.LLAJ., S.IP., M.M.	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	17-06-205	N	
6.	Disetujui	M. Wahyu Arya Putra, SE., MMTR	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	17-06-75	f,	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Edy Purwanto

Jabatan

: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

: Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan

: Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perhubungan Darat

> Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si. NIP. 19670131 202521 1 001

Sorong, 17 Juni 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Papua Barat

Edv Purwanto

NIP. 19841217 200912 1 002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Edv Purwanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama

: Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Sorong, 17Juni 2025 Pihak Pertama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	S	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	IN	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1.	SK2	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2.1	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	23
2.	SK5	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1
			IKK6	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5
3.	SK8	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	2
			IKK8.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7
4.	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6
			IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5
			IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4

NO.	S	ASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INI	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
			IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1
5.	SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2	Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah		6
6.	SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis		3.593
7.	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda		400
			IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda		100
8.	SK4	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat		3
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat		1
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan		2
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat		1
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	IN	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6
	T.	IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
		IKK4.9	Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3
		IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3

KEG	IATAN	ANC	GGARAN
1. I	infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000
2. H	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000
3. F	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000
4. F	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000

Disetujui Direktur Jenderal Perhubungan Darat

> Dr. Drs. Aan Subanan, M.Si. NIP. 19670131 202521 1 001

Sorong, 17 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INI	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6
	ž.	IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1
		IKK4.9	Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3
		IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3

KE	GIATAN	ANC	GGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	60.113.993.000
2.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	17.352.602.000
3.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	3.914.645.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	10.862.106.000

Disetujui Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Subanan, M.Si. NIP. 19670131 202521 1 001

Sorong,/7Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Papua Barat



REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TAHUN 2025

	SASARAN	INDIKATOR								RI	INCANA P	PELAKSAN	NAAN			-			PENANGGUNG
NO	KEGIATAN	KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Bulan-	Bulan- 2	Bulan-	Bulan-	Bulan- 5	Bulan-	Bulan-	Bulan- 8	Bulan- 9	Bulan- 10	Bulan- 11	Bulan- 12	ANGGARAN (Rp)	JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	SK2 Meningkatn ya konektivitas jaringan transportasi	IKK2.1 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	25	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	7.742.992.000	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	DTPK																		Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKKS Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana		-	-		2	2			-		1	8	17.000.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	35.371.001.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi	Unit	2	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak		-	-				-		-	1		-	228.732.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	pelayanan publik sektor transportasi ASDP	SPM			Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	-	-	-	*		=	-	-		1	-	-	143.992.000	

	SABARAN	INDIKATOR								RI	encana f	ELAKSAI	IAAN						PENANGGUNG
NO	KEGIATAN	KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Bulan-	Bulan- 2	Buian-	Bulan- 4	Bulan- 5	Bulan- 6	Bulan-	Bulen- 8	Bulan- 9	Bulan- 10	Bulan- 11	Bulan- 12	ANGGARAN (Rp)	JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan: 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati 7. wasior	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2.516.175.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
4.	SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang	IKK9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	396.800.000	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberanga
	dan Barang				Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	-	-	1		-	-	-					1		n 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberanga n, dan Pengawasan
		IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	-	-	1	-	-	1	-	1	- '	1		1	222.500.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		iKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	Supervisi perlengkapan Jalan	-		-	-	1	-		1			-	2	382.002.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	84.760.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
5.	SK10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya; Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan	-		-	-	-				4	1	1		400.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

		INDIKATOR	T			ľ				RI	encana f	PELAKSAI	NAAN		-				PENANGGUNG
NO	SASARAN KEGIATAN	KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Bulan- 1	Bulan- 2	Bulan-	Bulan-	Bulan- 5	Bulan- 6	Bulan-	Bulan- 8	Bulan- 9	Bulan- 10	Bulan- 11	Bulan- 12	- ANGGARAN (Rp)	JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Bermotor; 3. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.														
6.	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan	Unit	3.593	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	-	-	-	3.385	-		-	-		•	•	-	2.149.475.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		sesuai spesifikasi teknis			2. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	-	-	-	-		-	208	-		-	-	-	1.027.026.063	
7	SK12 Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamata n	IKK12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya		-		-	-	-	-	- "	-	-	400	-	300.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya			-			-	-		-	-	100	-	107.143.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.	SK4 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	-	-	1	-	1		1		-	-	-	-	-	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	i	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		-		-	-	-	1	-	-		-	-	-	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	-	-	•		-		1	-	1		-	· 	-	Sub Bagian Tata Usaha

	SASARAN	INDIKATOR								RI	ENCANA I	PELAKSAI	NAAN						PENANGGUNG
10	KEGIATAN	KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan-	Bulan- 9	Bulan- 10	Bulan- 11	Bulan- 12	- ANGGARAN (Rp)	JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	ı	IKK4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan		-	-	¥	1	-		-	-	-			-	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	-	C#	1	1	1	1	1	1	-			¥	-	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Kegiatan HUMAS Kegiatan PPID	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		Sub Bagian Tau Usaha
		IKK4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan layanan perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.016.642.000	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.9 Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)		-	1				*		*		2		272.720.000	Sub Bagian Tata Usaha
		IKK4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	2		-	*			3	-		1	2	13.	675,000.000	Sub Bagian Tata Usaha
					Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM														

Sorong,**17**Juni 2025 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

BALAI PE TRANSPOR KELAS II

NIP. 19841217 200912 1 002

BULAN JANUARI TAHUN 2025

										Та	arget Bulan-1		Rea	ilisasi Bulan-1	% Capai	an Bulan-1			
No	Sasaran Kegiatan	Iı	ndikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target	Output	Target Ange	garan	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	7.742.992.000	100	-	0	0,00	0,00	kegiatan sudah berjalan dengan menggunakan kontrak PL (Penunjukan Langsung) namun belum ada realisasi anggaran	rencana pembayaran termin I akan dilakukan pada minggu kedua bulan Februari setelah efisiensi anggaran di pusat telah selesai	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.5	Persentase pelaksanan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangn Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	35.371.001.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan sudah berjalan dengan menggunakan kontrak PL (Penunjukan Langsung) namun belum ada realisasi anggaran	rencana pembayaran termin I akan dilakukan pada minggu kedua bulan Februari sulan Februari sanggaran di pusat telah selesai	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	0	0	0,00	0,00	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	0,00	0	0,00	0,00	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksankan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
						2. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Danau, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00		masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas
						Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	4	100	12.456.000.000	100	0	0	0,00	0,00	telah dilakukan kontrak pada pengadaan paku jalan	rencana pembayaran uang muka akan dilakukan pada bulan Februari	Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	Berlalu Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dli	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90		Ditjen Perhubungan Darat	Darat	90	100	3.914.645.000	100	5,00	115.824.000	5,56	2,96	dinas dan belanja keperluan kantor	kegiatan rutin dengan baik dan memperhatihan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	6,00	550.680.000	6,67	6,60	belanja sewa	sisa belanja sewa akan dilaksanakan pada bulan Februari	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 4 Februari 2025 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

									Та	rget Bulan-2		Rea	lisasi Bulan-2	% Capai	an Bulan-2			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target	Output	Target Angg	jaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	7.195.322.104	100	-	411.198.563	0,00	5,71	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I	rencana selanjutnya akan di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangn Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	16.609.782.000	100	0	1.236.500.104	0,00	7,44	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I	rencana selanjutnya akan di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperas	Lokasi i	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	361.644.000	100,00	14,37	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada periode angkutan lebaran Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standa Pelayanaan Minimur (SPM) di pelabuhai SDP	1	100	Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	10,00	361.644.000	10,00	14,37	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksankan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasan terhadap kondisi ideal	%	100	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
					Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
<u> </u>	1	<u> </u>				<u> </u>						<u> </u>				L	<u> </u>	

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	School of the Control
						Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	4	100	12.456.000.000	100	0	0	0,00	0,00	telah dilakukan kontrak pada pengadaan paku jalan	rencana pembayaran uang muka akan dilakukan pada bulan Maret 2025	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNIKI	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
4.	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	10,00	360.681.000	11,11	9,21	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	kegiatan rutin dengan baik dan memperhatihan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan Subbagian Tata Usaha
5.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	10,00	930.554.672	11,11	11,15	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dab 4 serta sewa mes untuk pegawai	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatihan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbagian Tata Usaha

Sorong, 4 Maret 2025

Kelas II Rapua Barat

Kelas II Rapua Barat

Kelas II Rapua Barat

Kelas II Papua Barat

Kelas II Papua Barat

Kelas I Papua Barat

Kel

BULAN MARET TAHUN 2025

											Ta	rget Bulan-3		Rea	lisasi Bulan-3	% Capai	an Bulan-3			
ı	No	Sasaran Kegiatan	In	ndikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target	Output	Target Angg	jaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
										Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%	1		
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	. S	K1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100		Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	3.786.268.590	100	17,00	837.383.545	17,00	22,12	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin II dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuiakan dengan anggaran yang tersedia	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
				Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	12.346.883.000	100	17	1.236.500.104	17,00	10,01	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin I dan telah di lakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	yang belum ada realisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuiakan dengan anggaran yang tersedia	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7		Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola		7	100	2.516.175.000	100	100	603.168.000	100,00	23,97	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada periode arus balik angkutan lebaran Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2	. Si	(2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100		jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	20,00	603.168.000	20,00	23,97	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksankan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3	. 9	6K4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
							Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	2.068.167.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap	%	100	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan		Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	
			kondisi ideal			Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	4	100	2.203.167.000	100	50	1.800.162.875	50,00	81,71	pekerjaan masih dan sedang berjalan saat ini sudah pembayaran uang uang muka	rencana pembayaran selanjutnya setelah progres	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dll	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
4.	SKS Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3.914.645.000	100	10,00	368.081.000	11,11	9,40	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	kegiatan rutin dengan baik dan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subbagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	20,00	2.033.087.035	22,22	24,36	telah dilakukan belanja sewa untuk mes eselon 3 dab 4 serta sewa mes untuk pegawai. Pembayaran gaji untuk PPNPN dan jasa Autsorsing hingga bulan maret maret telah di bayarkan	melaksanakan kegiatan rutin dengan baik dan memperhatihan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbagian Tata Usaha

BULAN APRIL TAHUN 2025

		1								Ta	rget Bulan-4	-,	Res	ilisanj Bulan-4	% Capiel	an Butan-4	J	1	Τ
No	Seseran Kegistan	In	dikator Kiherja	Satuan	Tanget delem PK	Keglatan	Indikator Kinerje Output	Tacpet Kinerje Output	Torget	Output	Target Ang	Prices	Resileasi Output	Reelisaal Anggaran	Capelan Output	Capalan Anggaran	Evaluaci	Rencena Tindele Lanjut	Penanggung Jawab
									Volume	96	Volume	%	Volume	Volume	%	96	1	İ	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi		Persentase pelaksanaan keperintsan angkutan jalan	%	.100		Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dikayani	Layanen Angkutan Jalan Perintis	100	100	3.786.268.590	100	25,00	1.099.462.492	25,00	29,04	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin III dan Telah dilakukan addendum kontral untuk menyesuaikan hasil efisiensi	pembayaran termin TV akan dilaksanakan pada awal bulan April. melaksanakan kegatan dengan balk dan menyesuakan dengan anggaran yang tersedia	Penyeberangan 2. Seksi Lafu Lintas Jalan, Sungal, Danau, Penyeberangan, dar Pengawasan
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeterangan	96	100	Subsidi Operasional Perints Angkutan Perintserangn Provinsi Papua Barat	Jumish Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barait	100	100	12.346.883.000	100	17	2.276 000.521	17,00	18,43	kegietan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin II dan telah di lakukan addendum kontral untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	memproses pembayarn termin I untuk I lintasan yang belum ada realisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan dengan balik dan menyesulakan dengan anggaran yang tersedia	Seksi Serana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dar Pengawasan
		IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang peroperasi	Lokası	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelole	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	721.821.960	100,00	·	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualikas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan balik khususnya pada periode arus balik angkutan lebaran Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	.100	Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapel	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	27,90	721.821.960	27,00		kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksankan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksenaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	1KK3.1	Persentase pertengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0	-	0,00		kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seks; La'u Lintas
						Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalar	1	100	2.068.167.000	100	15	397.620.300	15,00		pembayaran termin I	kegiatan masih dan sedang berjalan dengan balik	Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

		‡KK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	₩	100	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	190	0	0	0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	
		ļ				Pemasangan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalati	4	100	2.203.167.000	100	100	2.695.693.250	150,00	95,12	kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan PHO	saat ini masih dalam tahap pemeliharaan hasi pekerjaan.	Seksi Laiu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pangawasan
		IKK3.5	Jumlah mesyarakat yang bersosalisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500		Jumlah Kumulatif Masyerakat yang Mendapat Sosiaksasi pada PNK)	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	500	100	407.143.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September	melakukan persiapan seperti memesan perlengkapan untuk sosialisasi dil	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	700	Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotox	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	O	0	9,00	0,00	rencana kegiazan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pangawasan
	SKS Meningkatnya Kualitas Penyebenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat		Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nitai	.90	Perhubungan Darat	Kegatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Dera:	90	100	3.914.645.000	100	10,00	540.121.500	11,11	13,80		kegiatan rutin dengan balk dan memperbathan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Seksi Sarana dari Angkultan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 3. Seksi Laliu Unitas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan 4. Subjagian Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Brokrasi Otten Perhubungan Darat	IKK1	Tingkal Panyelan Perkankoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasocnal dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	25,00	2.369.559.515	27,78	28,39	3 dab 4 serta sewa mes untuk pegawai. Pembayaran gaji	melaksanakan kegiatan rutin dengan balk dan memperhatihan anggaran menglingat terdapat efisiensi anggaran.	Subbaçları Tata Usaha

Sorong, 2 Mei 2025 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

NIP. 19841217 200912 1 002

BULAN MEI TAHUN 2025

		10% 50%	Marine September				Violence VI residen			Ta	rget Bulan-5		Rea	llisasi Bulan-5	% Capai	an Bulan-5		Keshert School	
No	Sasaran Kegiatan	Indil	kator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target	Output	Target Angg	jaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
									Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	p ki	ersentase elaksanaan eperintisan ngkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	6,436.860.143	100	64,00	1.543.634.241	64,00	23,98	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin IV dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesualikan hasil efisiensi anggaran	awal bulan Juni, melaksanakan kegiatan dengan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		p k	ersentase elaksanaan elayanan eperintisan ngkutan enyeberangan	%	100	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Penyeberangn Provinsi Papua Barat	Jumlah Lintas Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	Layanan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Papua Barat	100	100	15.842.738.000	100	60	2.276.000.521	60,00	14,37	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin II dan telah di lakukan addendum kontral untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	memproses pembayam termin I untuk I lintasan yang belum ada realisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuiakan dengan anggaran yang tersedia	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			umlah Pelabuhan iDP yang beroperasi	Lokasi	7	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dikelola	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola	7	100	2.516.175.000	100	100	873.630.741	100,00	34,72	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitias pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat teriayani dengan baik khususnya pada masa persiapan lebaran idul adha Tahun 2025	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	, p	Persentase Jelaksanaan Standar Pelayanan Minimum SPM) di pelabuhan JDP	%	100	Monitoring dan pengawasan pemenuhan SPM Kapal	jumlah pengawasan pemenuhan SPM Kapal	Pemantauan dan evaluasi tupoksi Ditjen Hubdat	100	100	2.516.175.000	100	27,00	873.630.741	27,00	34,72	kegiatan SPM pelabuhan SDP Rencananya akan dilaksankan pada triwulan II	Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
a:	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	p y ti	Persentase verlengkapan jalan rang telah terpasang erhadap kondisi deal	%	100	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	1	100	921.292.000	100	0		0,00	0,00	kegiatan masih dalam proses persiapan kontrak	masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
						Perneliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipelihara	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	1.325.401.000	100	100	1.093.455.825	100,00	82,50	kegiatan sudah pembayaran termin I	kegiatan masih dan sedang berjalan dengan baik	Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

						*									0.00	0.00	Transaction and the	I made manusage	
		IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan		Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	1	100	1.100.000.000	100	0	0	0,00	0,00		masih menunggu kepastian hasil efisiensi anggaran dari pusat	
						Pengadaan dan Pemasangan Pelengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah unit Perlengkapan Jalan yang dipasang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	4	100	3.230.193.063	100	100	2.511.274.819	100,00	77,74	jalan sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan PHO. Sedangkan pengadaan dan pemasangan guadrail sudah pembayaran uang muka	tahap pemeliharaan hasil pekerjaan sedangkan kegiatan pengadaan dan pemasangan guadrail masih dan sedang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungal, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKJ	Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi pada PNKU	500	100	407.143.000	100	0	0 ,,	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September, namun masih menyesuaikan dengan hasil effisiensi anggaran		Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Kaiibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta yang dilakukan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1	100	400.000.000	100	0	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025	kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	Penyeberangan, dan Pengawasan
4. S	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungar Darat	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	3,914.645.000	100	10,00	580.102.500	11,11	14,82	beberapa kegiatan rutin telah dilaksanakan seperti perjalanan dinas dan belanja keperluan kantor	kegiatan rutin dengan baik dan memperhatihan anggaran mengingat terdapat efisiensi anggaran.	Sekis Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Sekis Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Sekis Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Penyeberangan, dan Penyeberangan, dan Penyeberangan, dan Penyeberangan, dan Penyeberangan, dan Pengawasan Subbagian Tata Usaha
5. S	K1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	90	100	8.345.931.000	100	32,00	3.083.895.334	35,56	36,95	3 dab 4 serta sewi mes untuk pegawai.		Subbagian Tata Usaha

Sorong, 2 Juni 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Papua Barat

BALAI PENGELO

TRANSPORTASI KELAS II PAPU BAI

BULAN JUNI TAHUN 2025

									Ta	rget Bulan-6		Rea	lisasi Bulan-6	% Capai	an Bulan-6			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target	Output	Target Angg	jaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%	1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2,2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	25	Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	25	100	6.436.860.143	100	64,00	2.109.208.997	64,00	32,77	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin IV dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	dilaksanakan pada awal bulan Juli. melaksanakan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SKS Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKKS Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	1	100	17.000.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan belum dapat dilaksanakar karena sampai saat ini Pagu Anggaran masih di Blokir	kebagian anggaran terkait	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	5	100	15.712.625.000	100	60	10.287.160.906	60,00	65,47	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin V dan telak dilakukan Addendum kontrak untuk menyesuaikan dengan effisiensi anggaran	termin VI akan dilakukan pada pertengahan bulan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	2	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	1	100	228.732.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini kegiatan masih dalam tahap persiapan rencana kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV	gedung terminal bagian mana saja yang akan dilakukan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai,
					Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	1	100	143.992.000	100	0	-	0,00	0,00		rehabilitasi	Danau, dan Penyeberangan
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati 7. wasior	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati	7	100	2.516.175.000	100	100	938.654.069	100,00	37,30	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik khususnya pada masa persiapan lebaran idul adha	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

4. S	K9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya		Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	396.800.000	100	60	149.426.000	60	37,66	telah di lakukan Rampcheck pada angkutan orang maupun angkutan penyeberangan pada periodeng angkutan lebaran	rencanan selanjutnya akan dilakukan penindakan pada kendaraan odol di provinsi papua Barat Daya pada	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
						Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	396.800.000	100	60	149.426.000	60,00	37,66	dan saat ini dilakukan sosialisasi ODOL baik melalui media Online maupun media cetak	Bulan Agustus 2025	2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	5	100	394.620.000	100	50	37.993.000	50,00	9,63	kegiatan masih dan sedang dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapan kendala	selalu melkukan koordinasi dan pemantauan secara langsung agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	4	100	382.002.000	100	20	53.692.000	20,00	14,06	saat ini pengadaan dan pemasangan paskes telah selesai dilaksanakan	melakukan pengawasan terhadap Faskes yang telah terpasang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	84.760.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini pemeliharan paskes masih dan sedang berlangsing	melakukan pengawasan dengan baik	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
5. SI	K10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2	2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	6	100	400.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	
						Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor: Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor: Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.										dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja		Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
6. SI	K11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3593	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	3385	100	2.149.475.000	100	100,00	2.149.475.000	100,00	100,00	kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan PHO. Sedangkan	saat ini untuk pengadaan paku jalan masih dalam tahap pemeliharaan hasil pekerjaan sedangkan	Jalan, Sungai,
						2. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	208	100	1.027.026.063	100	30,00	308.107.819	30,00	30,00	pengadaan dan pemasangan guadrail sudah pembayaran uang muka	kegiatan pengadaan dan pemasangan guadrail masih dan sedang berjalan.	Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

7.		Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	400	100	300.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Lalu Lintas Usia	100	100	107.143.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.	Li	leningkatnya ayanan Manajemen DM Internal	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	I. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	3	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini kegiatan penyusunan pagu kebutuhan TA. 2026 masih dan sedang berjalan	melakukan koordinasi yang baik dengan pihak internal BPTD Kelas II Papua Brat maupun pemerintah pusat	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	1	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini sedang dilaksanakan persiapan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kenutuhan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumer MR	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	2	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lembar kerja evaluasi ole Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kenutuhan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	1	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	saat ini tingkat penyerapan anggaran masih renda karena terdapan anggaran yang di blokit sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	melakukan revisi anggaran dan percepatan penyerapan anggarn	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan		1	100	1.885.240.000	100		449.584.500	0,00	23,85	telah dibuat surat tindak lanjut atas temuaan itjen	melakukan koordinasi dengan pihak penyedia yang pekerjaannya menjadi temuan itjen	Sub Bagian Tata Usaha

IKK4.9 Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa IKK4.9 Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa IKK4.10 Kegiatan Kegiatan IKK4.10 Kegiatan Kegiatan IKK4.10 Kegiatan Kegiatan IKK4.10 Kegiatan Kegiatan IIKK4.10 Kegiatan IIKK4.10 Kegiatan Kegiatan IIKK4.10 Kegiatan IIKK4.10 Kegiatan Kegiatan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1 100 3.016.64	5.240.000 100 6.542.000 100	449.584.500 815.494.374		saat ini selalu dilakukan sosialisasi terka keselamat balk melalui media online maupun media cetak 27,03 saat ini kegiatar layanan perkantoran ma dan sedang berjalan dengan balik	masyarakan terkait postingan pada media sosial melkukan pemenuhan sih terhadap kebutuhan	Sub Bagian Ta Usaha Sub Bagian Ta Usaha
IKK4.9 Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 1. Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis 2. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast) Peralatan Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan				0,00	layanan perkantoran ma dan sedang berjalan dengan	pemenuhan terhadap kebutuhan perkantoran namun tetap menyesuaikan dengan	
Kelola Pengadaan barang dan jasa non teknis pengadaan barang dan jasa non teknis pengadaan barang dan jasa non teknis 2. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas Dinas Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Peralatan pengadaan	3 100 272.720	720,000 100			T I	anggaran	
		200	0	0,00	0,00 telah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuh alat kehumasan namun saat ini anggarannya mi terblokir	anggaran terkait kemungkinan	Sub Bagian Ta Usaha
Pengembangan SDM Unit: Kerja Peningkatan Kompetensi SDM Eningkatan Kompetensi SDM Peningkatan Kompetensi SDM Peningkatan Kompetensi SDM 2. Kegiatan Terkait Peningkatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM SDM	3 100 675.000	.000.000 100	0	0,00	0,00 saat ini anggar inasih terblokir, untuk pelaksana kegiatan akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	koordinasi	Sub Bagian Tal Usaha

BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARM
KELAS II PAPUA BAJAK

BULAN JULI TAHUN 2025

									Та	rget Bulan-7		Rea	lisasi Bulan-7	% Capai	ian Bulan-7			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target	Output	Target Angg	garan	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK2,2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	25		Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	23	100	6.436.860.143	100	64,00	2.669.453.366	64,00	41,47	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin V dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	pembayaran termin VI akan dilaksanakan pada awal bulan Agustus. melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuiakan dengan anggaran yang tersedia	Penyeberangan 2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKKS Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	1	100	17.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan belum dapat dilaksanakan karena sampai saat ini Pagu Anggaran masih di Blokir	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	5	100	28.382.748.000	100	60	13.007.099.000	60,00	45,83	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin V dan telak dilakukan Addendum kontral karena adanya penambahan anggaran	selanjutnya pembayaran termin VI akan dilakukan pada pertengahan bulan Agustus 2025	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	2	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	1	100	228.732.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini kegiatan masih dalam tahap persiapan dokumen kontrak akan dilaksanakan pada triwulan IV	melakukan persiapan kegiatan seperti inventaris gedung terminal bagian mana saja yang akan dilakukan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai,
					Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	1	100	143.992.000	100	0	-	0,00	0,00		rehabilitasi	Danau, dan Penyeberangan
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati 7. waigeo	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati	7	100	2.516.175.000	100	100	956.124.069	100,00	38,00	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	396.800.000	100	60	149.426.000	60	37,66	telah di lakukan Rampcheck pada angkutan orang maupun angkutan penyeberangan pada periodeng angkutan lebaran	rencanan selanjutnya akan dilakukan penindakan pada kendaraan odol di provinsi papua Barat Daya pada	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
							Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	396.800.000	100	60	149.426.000	60,00	37,66	dan saat ini dilakukan sosialisasi ODOL baik melalui media Online maupun media cetak	Bulan Agustus 2025	2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	5	100	394.620.000	100	50	37.993.000	50,00	9,63	kegiatan masih dan sedang dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapan kendala	selalu melkukan koordinasi dan pemantauan secara langsung agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	4	100	382.002.000	100	20	53.692.000	20,00	14,06	saat ini pengadaan dan pemasangan paskes telah selesai dilaksanakan	melakukan pengawasan terhadap Faskes yang telah terpasang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	84.760.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini pemeliharan paskes masih dan sedang berlangsung	melakukan pengawasan dengan baik	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
5.	SK10	0 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2	2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	6	100	400.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	
							Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Rermotor Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji	Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji									dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja		Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
							Bermotor Non Statis.	Kendaraan Bermotor Non Statis.	Kendaraan Bermotor Non Statis.											
6.	SK11	1 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3593	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	3385	100	2.149.475.000	100	100,00	2.149.475.000	100,00	100,00	kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan PHO. Sedangkan	saat ini untuk pengadaan paku jalan masih dalam tahap pemeliharaan hasil pekerjaan sedangkan	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau.
							Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	208	100	1.027.026.063	100	80,00	847.296.502	80,00	82,50	pengadaan dan pemasangan guadrail sudah pembayaran termin	kegiatan pengadaan dan pemasangan guadrail masih dan sedang berjalan.	Penyeberangan, dan Pengawasan

7.	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	400	100	300.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Lalu Lintas Usia	100	100	107.143.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.		Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	3	100	1.885.240.000	100	67,00	470.384.500	67,00	24,95	saat ini kegiatan penyusunan pagu kebutuhan TA. 2026 masih dan sedang berjalan	melakukan koordinasi yang baik dengan pihak internal BPTD Kelas II Papua Brat maupun pemerintah pusat	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	1	100	1.885.240.000	100	100,00	470.384.500	100,00	24,95	saat ini sedang dilaksanakan persiapan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kenutuhan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	Penyusunan SPIF Penyusunan Dokumen MR	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	2	100	1.885.240.000	100	50,00	470.384.500	50,00	24,95	saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lembar kerja evaluasi ole Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kenutuhan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	1	100	1.885.240.000	100	100,00	470.384.500	100,00	24,95	saat ini tingkat penyerapan anggaran masih renda karena terdapan anggaran yang di blokir sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	melakukan revisi anggaran dan percepatan penyerapan anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	1	100	1.885.240.000	100	100,00	470.384.500	100,00	24,95	telah dibuat surat tindak lanjut atas temuaan itjen	melakukan koordinasi dengan pihak penyedia yang pekerjaannya menjadi temuan itjen	Sub Bagian Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	6	100	1.885.240.000	100	33,00	470.384.500	33,00	24,95	saat ini masih terdapat beberapa aset BMN yang belum tercatat	melakukan penata usahaan Aset BMN yang belum tercatat dengan baik	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Kegiatan HUMAS Kegiatan PPID	Kegiatan HUMAS Kegiatan PPID	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	3	100	1.885.240.000	100	100,00	470.384.500	100,00	24,95	saat ini selalu dilakukan sosialisasi terkait keselamat baik melalui media online maupun media cetak	melakukan pemantauaan terhadap resmon masyarakan terkait postingan pada media sosial	Sub Bagian Tata Usaha
	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan layanan perkantoran	Kegiatan layanan perkantoran	Kegiatan layanan perkantoran	1	100	3.016.642.000	100	100,00	923.013.627	100,00	30,60	saat ini kegiatan layanan perkantoran masih dan sedang berjalan dengan baik	melkukan pemenuhan terhadap kebutuhan perkantoran namun tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.9	Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)	dan jasa non teknis 2. Kegiatan terkait	Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)	3	100	272.720.000	100	33,00	0	33,00	0,00	telah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan alat kehumasan namun saat ini anggarannya masih terblokir	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.10	Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	3	100	675.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini anggaran masih terblokir, untuk pelaksanaan kegiatan akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha

Sorong, 6 Agustus 2025 Kepala Balai Penglola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat



BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

									Та	rget Bulan-8		Rea	lisasi Bulan-8	% Capai	an Bulan-8			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target	Output	Target Ango	garan	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1.	(2) SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	(3) IKK2.2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	(4) Trayek	(5)	(6) Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	(7) Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	(8) Layanan Angkutan Jalan Perintis	(9) 23	(10) 100	(11) 6.436.860.143	100	(13) 64,00	(14) 3.237.991.493	(15) 64,00	(16) 50,30	(17) kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran	(18) pembayaran termin VII akan dilaksanakan pada awal bulan	(19) 1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
					a q.a. saa soje											Termin VI dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	September. melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuiakan dengan anggaran yang tersedia	2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKKS Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	1	100	17.000.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan belum dapat dilaksanakan karena sampai saat ini Pagu Anggaran masih di Blokir	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat		Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	5	100	28.382.748.000	100	60	13.007.099.000	60,00	45,83	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin V dan telah dilakukan Addendum kontrak karena adanya penambahan anggaran	selanjutnya pembayaran termin VI akan dilakukan pada pertengahan bulan September 2025	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	2	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	1	100	228.732.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini kegiatan masih dalam tahap persiapan dokumen kontrak akan dilaksanakan pada triwulan IV	melakukan persiapan kegiatan seperti inventaris gedung terminal bagian mana saja yang akan dilakukan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan
					Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	1	100	143.992.000	100	0	-	0,00	0,00		rehabilitasi	Penyeberangan
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati 7. waigeo	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati	7	100	1.948.809.000	100	100	997.990.591	100,00	51,21	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	SK9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK9.2 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya		Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	396.800.000	100	60	149.426.000	60	37,66	telah di lakukan Rampcheck pada angkutan orang maupun angkutan penyeberangan pada periodeng angkutan lebaran	rencanan selanjutnya akan terus dilakukan sosialisasi ODOL baik melalui media cetak maupun media online	1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
						Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	396.800.000	100	60	149.426.000	60,00	37,66	dan saat ini dilakukan sosialisasi ODOL baik melalui media Online maupun media cetak	inedia orinite	2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK9.5 Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	5	100	394.620.000	100	50	37.993.000	50,00	9,63	kegiatan masih dan sedang dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapan kendala	selalu melkukan koordinasi dan pemantauan secara langsung agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK9.6 Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	4	100	382.002.000	100	20	53.692.000	20,00	14,06	saat ini pengadaar dan pemasangan paskes telah selesai dilaksanakan	n melakukan pengawasan terhadap Faskes yang telah terpasang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
			IKK9.7 Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	84.760.000	100	45,00	33.214.000	45,00	39,19	saat ini pemeliharan paskes masih dan sedang berlangsung	melakukan pengawasan dengan baik	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
5.	SK10	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK10.2 Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Pemeliharaan Alat	Barat dan Papua Barat Daya	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	6	100	400.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan	menunggu surat permintaan kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	
						Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Remontor: Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.									dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja		Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
6.	SK11	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesu spesifikasi teknis	Unit	3593	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	3385	100	2.149.475.000	100	100,00	2.149.475.000	100,00	100,00	kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan PHO. Dan	saat ini untuk pengadaan paku jalan masih dalam tahap pemeliharaan hasil pekerjaan sedangkan	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau.
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	208	100	1.080.718.063	100	100,00	1.029.366.759	100,00	95,25	pengadaan dan pemasangan guadrail sudah dilaksanakan dan akan dilakukan PHO	kegiatan pengadaan dan pemasangan guadrail telah selesai dan akan dilakukan PHO.	Penyeberangan, dan Pengawasan

7.	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	400	100	300.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
			IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Lalu Lintas Usia	100	100	107.143.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.		Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	1. Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; 2. Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; 3. Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	3	100	1.885.240.000	100	67,00	476.584.500	67,00	25,28	saat ini kegiatan penyusunan pagu kebutuhan TA. 2026 masih dan sedang berjalan	melakukan koordinasi yang baik dengan pihak internal BPTD Kelas II Papua Brat maupun pemerintah pusat	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	1	100	1.885.240.000	100	100,00	476.584.500	100,00	25,28	saat ini sedang dilaksanakan persiapan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kenutuhan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	2	100	1.885.240.000	100	50,00	476.584.500	50,00	25,28	telah dilakukan pemeriksaan lembar kerja evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kenutuhan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	1	100	1.885.240.000	100	100,00	476.584.500	100,00	25,28	saat ini tingkat penyerapan anggaran masih renda karena terdapan anggaran yang di blokir sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	melakukan revisi anggaran dan percepatan penyerapan anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	1	100	1.885.240.000	100	100,00	476.584.500	100,00	25,28	telah dibuat surat tindak lanjut atas temuaan itjen	melakukan koordinasi dengan pihak penyedia yang pekerjaannya menjadi temuan itjen	Sub Bagian Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKK4	.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	6	100	1.885.240.000	100	33,00	476.584.500	33,00	25,28	terdapat beberapa usaha aset BMN yang yang b	n Aset BMN	Sub Bag Usa
IKK4	.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Kegiatan HUMAS Kegiatan PPID	Kegiatan HUMAS Kegiatan PPID	Kegiatan HUMAS Kegiatan PPID	3	100	1.885.240.000	100	100,00	476.584.500	100,00	25,28	sosialisasi terkait terhad keselamat baik masya melalui media terkait	auaan p resmon	Sub Ba Us
IKK4	.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan layanan perkantoran	Kegiatan layanan perkantoran	Kegiatan layanan perkantoran	1	100	3.016.642.000	100	100,00	986.983.928	100,00	32,72	saat ini kegiatan layanan perkantoran masih dan sedang berjalan dengan baik menye denga keters angga	ihan p nan oran tetap uaikan	Sub Ba
IKK4	.9 Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	1. Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis 2. Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas 3. Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)	Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)	dan jasa non teknis	3	100	272.720.000	100	33,00	0	33,00	0,00	namun saat ini kemur	asi n an terkait ıkinan kaan blokir	Sub Bag Us
IKK4.	10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	3	100	675.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	menyesuaikan kemur	asi n an terkait Ikinan kaan blokir	Sub Bag Us

Sorong, 1 September 2025 Kepala Balai Penglola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat



Edy Purwanto NIP. 19841217 200912 1 002

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

									Tai	rget Bulan-9		Rea	llisasi Bulan-9	% Capai	an Bulan-9			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target	Output	Target Ang	jaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran	Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
1.	(2) SK2 Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	(3) IKK2.2 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	(4) Trayek	(5) 23	(6) Subsidi Operasional Perintis Angkutan Jalan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya	(7) Jumlah lintas angkutan jalan perintis yang dilayani	(8) Layanan Angkutan Jalan Perintis	(9) 23	100	(11) 6.436.860.143	100	(13) 64,00	(14) 3.821.877.095	(15) 64,00	(16) 59,37	(17) kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran	pembayaran termin VIII akan dilaksanakan pada awal bulan	(19) 1. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
						,										Termin VII dan Telah dilakukan addendum kontrak untuk menyesuaikan hasil efisiensi anggaran	Oktober. melaksanakan kegiatan dengan baik dan menyesuiakan dengan anggaran yang tersedia	2. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
2.	SK5 Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	Pembangunan Pelabuhan Kaimana Tahap IV di Kab. Kaimana	1	100	17.000.000.000	100	0	0	0,00	0,00	kegiatan belum dapat dilaksanakan karena sampai saat ini Pagu Anggaran masih di Blokir	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	5	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	Layanan Subsidi Perintis di Provinsi Papua Barat	5	100	28.382.748.000	100	60	14.310.939.427	60,00	50,42	kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran Termin V	selanjutnya pembayaran termin VI akan dilakukan pada pertengahan bulan Oktober 2025	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
3.	SK8 Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK8.1 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang ditingkatkan pelayanannnya untuk memenuhi SPM	Unit	2	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Klademak	1	100	228.732.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini kegiatan masih dalam tahap persiapan dokumen kontrak akan dilaksanakan pada triwulan IV	melakukan persiapan kegiatan seperti inventaris gedung terminal bagian mana saja yang akan dilakukan	Seksi Prasarana Jalan, Sungai,
					Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	Rehabilitasi, Perbaikan dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Arar	1	100	143.992.000	100	0	-	0,00	0,00		rehabilitasi	Danau, dan Penyeberangan
		IKK8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Lokasi	7	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati 7. waigeo	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati	Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan : 1. Klademak; 2. Arar 3. Marampa 4. Folley 5. Batanta 6. Salawati	7	100	1.948.809.000	100	100	1.100.374.671	100,00	56,46	operasional pelabuhan penyeberangan masih dan sedang berjalan dengan baik	meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

4.	SK9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang		Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	6	Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya		Kegiatan Pengendalian dan operasional angkutan barang (odol) di Provinsi Papua Barat Daya Ramp Check angkutan barang di Provinsi Papua Barat Daya	3	100	400.000.000 350.000.000	100	60	39.443.000 53.293.000	60,00	9,86	telah di lakukan Rampcheck pada angkutan orang maupun angkutan penyeberangan pada periodeng angkutan lebaran dan saat ini dilakukan sosialisasi ODOL baik melalui media Online maupun	rencanan selanjutnya akan terus dilakukan sosialisasi ODOL baik melalui media cetak maupun media online	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin	Kegiatan	5	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	Pengawasan Evaluasi MRLL dan Andalalin di Provinsi Papua Barat Daya	5	100	394.620.000	100	50	37.993.000	50,00	9,63	media cetak kegiatan masih dan sedang dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapan kendala	selalu melkukan koordinasi dan pemantauan secara langsung agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.6	Pengawasan Evaluasi Perlengkapan Jalan	Kegiatan	4	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	Supervisi perlengkapan Jalan	4	100	429.856.000	100	20	53.692.000	20,00	12,49	saat ini pengadaan dan pemasangan paskes telah selesai dilaksanakan	melakukan pengawasan terhadap Faskes yang telah terpasang	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
		IKK9.7	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan	1	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengawasan Evaluasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1	100	84.760.000	100	45,00	33.214.000	45,00	39,19	saat ini pemeliharan paskes masih dan sedang berlangsung	melakukan pengawasan dengan baik	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
	SK10 Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety		Jumlah kegiatan terkait uji kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	6	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor Perawatan dan Kalibras Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	Barat dan Papua Barat Daya Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	Kegiatan kalibrasi alat uji berkala di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat dan Papua Barat Daya Pemeliharanan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	6	100	500.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan alat kalibrasi alat uji kalibrasi kendaraan bermotor	menunggu surat permintaan Kalibrasi dari Kota dan Kabupaten di Papua Barat Daya dan Papua Barat	
6.	SK11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK11.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasionalkan sesuai dengan sesuai spesifikasi teknis	Unit	3593	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Paku Jalan)	3385	100	2.149.475.000	100	100,00	2.149.475.000	100,00	100,00	kegiatan telah selesai dilaksanakan	saat ini dilakukan pengawasan terhadap hasil kegiatan	
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	208	100	3.684.252.156	100	50,00	1.824.193.890	50,00	49,51	terdapat 3 lokasi kegiatan pengadaan dan pemasangan Guadrail, 1 lokasi sudah selesai dan 2 lokasi lainnya masih proses penyelesaian dan saat ini sudah pembayaran uang	melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang masih dan sedang berjalan	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan
						Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Dokumer yang diterbitikan central pengadan pengad					ik mengguna				30,00	50,00	terdapat pembukaan blokir anggaran kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas saat ini kegiatan sudah berjalan dan sudah pembayaran termin I	melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang masih dan sedang berjalan	

^lyan<mark>g diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B\$rE), Badan Siber darl Sandi Negara (BSSN).^l</mark>

7.	SK12	Meningkatnya kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK12.1	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	400	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	Pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	400	100	300.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November 2025 namun	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
																		menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja	pembukaan blokir anggaran	
			IKK12.2	Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	100	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) di Provinsi Papua Barat Daya	100	100	107.143.000	100	0,00	0	0,00	0,00	rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November 2025 namun menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran mengingat saat ini terdapat effisiensi anggaran di setiap unit kerja	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
8.	8. SK4 Meningkatnya Layanan Manajem SDM Internal	Layanan Manajemen	IKK4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi. Pagu Alokasi.	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	Penyusunan RKKL Pagu Kebutuhan; Penyusunan RKKL Pagu Indikatif; Penyusunan RKKL Pagu Alokasi.	3	100	1.885.240.000	100	67,00	500.672.425	67,00	26,56	saat ini kegiatan penyusunan pagu kebutuhan TA. 2026 masih dan sedang berjalan	melakukan koordinasi yang baik dengan pihak internal BPTD Kelas II Papua Brat maupun pemerintah pusat	Sub Bagian Tata Usaha
				Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	1	100	1.885.240.000	100	100,00	500.672.425	100,00	26,56	saat ini sedang dilaksanakan persiapan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kenutuhan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Kegiatan	2	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	Penyusunan SPIP Penyusunan Dokumen MR	2	100	1.885.240.000	100	50,00	500.672.425	50,00	26,56	telah dilakukan pemeriksaan lembar kerja evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	melakukan pemenuhan data dukung sesuai kenutuhan evaluator	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	Kegiatan terkait dengan subbag keuangan/TU	1	100	1.885.240.000	100	100,00	500.672.425	100,00	26,56	saat ini tingkat penyerapan anggaran masih renda karena terdapan anggaran yang di blokir sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan	melakukan revisi anggaran dan percepatan penyerapan anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	Tindak lanjut hasil Audit/Pemeriksaan	1	100	1.885.240.000	100	100,00	500.672.425	100,00	26,56	telah dibuat surat tindak lanjut atas temuaan itjen	melakukan koordinasi dengan pihak penyedia yang pekerjaannya menjadi temuan itjen	Sub Bagian Tata Usaha
			IKK4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	6	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	Kegiatan terkait pengelolaan BMN/Aset; Kegiatan Penatausahaan BMN	6	100	1.885.240.000	100	33,00	500.672.425	33,00	26,56	saat ini masih terdapat beberapa aset BMN yang belum tercatat	melakukan penata usahaan Aset BMN yang belum tercatat dengan baik	Sub Bagian Tata Usaha

IKK4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Kegiatan HUMAS Kegiatan PPID	Kegiatan HUMAS Kegiatan PPID	1. Kegiatan HUMAS 2. Kegiatan PPID	3	100	1.885.240.000	100	100,00	500.672.425	100,00	26,56	saat ini selalu dilakukan sosialisasi terkait keselamat baik melalui media online maupun media cetak	melakukan pemantauaan terhadap resmon masyarakan terkait postingan pada media sosial	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	1	Kegiatan layanan perkantoran	Kegiatan layanan perkantoran	Kegiatan layanan perkantoran	1	100	3.645.930.000	100	100,00	1.265.121.746	100,00	34,70	saat ini kegiatan layanan perkantoran masih dan sedang berjalan dengan baik	melkukan pemenuhan terhadap kebutuhan perkantoran namun tetap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.9	Kagiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3	Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas Kegiatan terkait pengadaan Pakaian Dinas Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)	Kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa non teknis Kegiatan terkait pengadaan Pakaiar Dinas Kegiatan terkait pengadaan Peralatan Kehumasan (Podcast)	pengadaan barang dan jasa non teknis	3	100	272.720.000	100	33,00	0	33,00	0,00	telah dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan alat kehumasan namun saat ini anggarannya masih terblokir	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha
IKK4.10) Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	3	Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	Kegiatan Terkait Peningkatan Kompetensi SDM Kegiatan Terkait Peningkatan Motivasi SDM	Terkait Peningkatan Kompetensi SDM	3	100	675.000.000	100	0,00	0	0,00	0,00	saat ini anggaran masih terblokir, untuk pelaksanaan kegiatan akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	melakukan koordinasi kebagian anggaran terkait kemungkinan pembukaan blokir anggaran	Sub Bagian Tata Usaha

Sorong, 1 Oktober 2025 Kepala Balai Penglola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat







DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI